



Jurnal Pendidikan Universitas Garut
Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan
Universitas Garut
ISSN: 1907-932X

Strategi Pengembangan Mutu Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Karakter

Ijudin

Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut

Abstrak

Artikel ini membahas tentang Strategi Pengembangan Mutu Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Karakter. Metodologi pembahasan yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis studi literatur. Adapun kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan bahwa: pendidikan harus mampu membentuk secara utuh pribadi lulusan yang mencerminkan karakter dan budaya bangsa; Proses pendidikan masih menitikberatkan dan memfokuskan capaiannya secara kognitif. Sementara, aspek afektif pada diri peserta didik yang merupakan bekal kuat untuk hidup di masyarakat belum dikembangkan secara optimal. Karena itu, pendidikan karakter merupakan suatu keniscayaan untuk dikembangkan di sekolah, sehingga lembaga pendidikan perlu melakukan strategi pengembangan dan didesain agar mampu menjawab tantangan masyarakat untuk menuju masyarakat madani serta lentur pada perubahan zaman dan masyarakat.

Kata kunci: Strategi, Pengembangan, Mutu. Pendidikan Karakter

1 Pendahuluan

Sejak awal, pertumbuhan pemikiran pendidikan Islam telah tumbuh di atas dua sumber pokok yang amat penting yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits. Di dalam dua sumber tersebut terdapat ayat-ayat atau pesan-pesan yang mendorong manusia untuk belajar membaca dan menulis serta untuk menuntut ilmu, memikirkan, merenungkan, dan menganalisis penciptaan langit dan bumi. Oleh karena itu, tujuan dari pendidikan untuk memberi cahaya terang kepada hati nurani dan pikiran serta menambah kemampuan Islam dalam melakukan proses pengajaran dan pendidikan. Karena Nabi Muhammad saw sendiri diutus pertama-tama untuk menjadi pendidik dan beliau adalah guru yang pertama dalam Islam.¹

Akan tetapi apa yang terjadi di kalangan dunia Islam dewasa ini, di mana telah muncul berbagai isu tentang krisis ekonomi, sosial, lingkungan hidup, terbelakang dan kumuh, dan krisis pendidikan serta problema lain yang sangat mendesak menuntut pemecahan.² Bahkan menurut Al-Faruqi, dalam aspek pendidikan didapat krisis yang terburuk.³

¹ Ali al-Jumbulati, *Perbandingan Pendidikan Islam*, terjemahan Prof. HM. Arifin, M. Ed., Reneka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 1.

² Syed Sajjad Husein dan Syed Ali Ashraf, *Crisis in Muslim Education*, terjemahan Rahmani Astuti, Risalah, Bandung, 1996.

³ Ismail Raji Al-Faruqi, *Tauhid Its Implications for Thought and Life*, terjemahan Rahmani Astuti, Pustaka, Bandung, 1988, hlm. Vii.

Keabsahan konstruksi pendidikan, termasuk dalam hal ini juga pendidikan Islam, sebenarnya telah lama dipertanyakan. Seperti sikap psimis dan ketakjubannya sosok Neil Postman dalam bukunya “Matinya Pendidikan” yang menyatakan bahwa manusia akan berhasil menata masa depannya tanpa harus “menerima” pendidikan.⁴ Bahkan Haidar Baqir mengungkapkan kegetirannya tentang pendidikan agama di sekolah-sekolah di Indonesia yang secara general telah dianggap gagal.⁵ Iqbal⁶ juga melakukan kritik terhadap sistem pendidikan Islam yang berlaku pada saat itu melalui gubahan sajak-sajaknya:⁷

“Aku tamat dari sekolah dan pesantren penuh duka,
Di situ tak kutemukan kehidupan,
Tidak pula cinta,
Tak kutemukan hikmah, dan tidak pula kebijaksanaan,
Guru-guru sekolah adalah orang-orang yang tak punya nurani,
Mati rasa, mati selera,
Dan kyai-kyai adalah orang-orang yang tak punya himmah,
Lemah cita, miskin pengalaman”

Hal ini merupakan keabsahan universal karena secara historis dinamika pendidikan Islam tidak berada pada konteks realitas yang vakum, namun pendidikan Islam berdialektika dengan fakta sejarah yang terus mengalir.

Pendidikan akan berdampak negatif apabila tidak dikelola secara profesional, sehingga akan menimbulkan berbagai kepalsuan dan kejumudan. Anak didik tidak diajarkan tentang bagaimana menjadi orang besar dengan menanamkan nilai-nilai kedisiplinan dan sebagainya, melainkan justru diberi contoh sebaliknya, yang setiap saat diperlihatkan oleh guru-gurunya. Anak didik ditakut-takuti dan dibiarkan hidup dalam suasana yang kacau serba tidak teratur. Pendidikan seperti ini, seperti yang dikatakan oleh Winarno Surachman, sebagai ‘pembunuh misterius’, dalam arti tidak memberikan suasana yang kondusif bagi perkembangan fitrah dan kreativitas, tidak menopang semangat keilmuan, serta tidak membekali kemampuan-kemampuan berupa keterampilan yang bermanfaat bagi masa depan. Melainkan justru memasung anak didik selama berjam-jam setiap hari dan dipaksa mempelajari serta menghafalkan ide-ide usang yang tidak fungsional dan menjanjikan masa depan. Ivan Illich menyebut praktek pendidikan seperti ini hanyalah merupakan penjara bagi anak-anak didik. Untuk itu, ia menganjurkan agar masyarakat dibebaskan dari model praktek pendidikan seperti ini (*deschooling society*).⁸

Memasuki abad 21 atau millennium ketiga ini, dunia pendidikan dihadapkan pada berbagai masalah yang sangat urgen yang apabila tidak diatasi secara tepat, tidak mustahil dunia pendidikan akan ditinggal oleh putaran zaman. Kesadaran tampilnya dunia pendidikan dalam memecahkan dan merespon berbagai tantangan baru yang timbul pada setiap zaman adalah suatu

⁴ Neil Postman, *Matinya Pendidikan: Redefinisi Nilai-Nilai Sekolah*, Yogyakarta: Jendela, 2002, hal. 161. Juga kumpulan pandangan-pandangan yang agak kontroversi tentang urgensi dan eksistensi pendidikan adalah Roem Topatimasang, *Sekolah itu Candu*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 23.

⁵ Haidar Baqir, “Gagalnya Pendidikan Agama”, Kompas, (Jakarta), 28 Pebruari 2003.

⁶ Muhammad Iqbal, *The Reconstrution of Religious Thought in Islam, Membangun Kembali Pikiran Agama dalam Islam*, terj. Audah dkk, (Jakarta: Tintamas, 1982), hal. 6

⁷ Abul Hasan al-Nadwi, *Nahw at-Tarbiyyah al-Hurrah, Pendidikan Islam yang Mandiri*, terj. Afif Muhammad, (Bandung: Dunia Ilmu, 1987), hal. 33.

⁸ A Malik Fadjar, *Visi Pembaharuan Pendidikan Islam*, (Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penyusunan Naskah Indonesia (LP3NI), 1998), hal. 56.

hal yang logis bahkan suatu keharusan. Hal demikian dapat dimengerti mengingat dunia pendidikan merupakan salah satu pranata yang terlibat langsung dalam mempersiapkan masa depan umat manusia. Kegagalan dunia pendidikan dalam menyiapkan masa depan umat manusia merupakan kegagalan bagi kelangsungan kehidupan bangsa.⁹

Bahkan saat ini pula, pendidikan Indonesia sedang dihadapkan pada suasana yang kompleks. Secara kuantitas, di mana-mana tumbuh subur berbagai lembaga yang mengatasnamakan lembaga pendidikan; mulai dari tingkat dasar, menengah, perguruan tinggi, bahkan sampai yang berlabelkan pondok pesantren. Namun, kemajuan kuantitas lembaga-lembaga pendidikan tersebut tidak dibarengi dengan kemajuan kualitas atau mutu, yakni kemampuannya untuk mengatasi berbagai persoalan serius bangsa. Winarno Surachmad bahkan menilai bahwa pendidikan Indonesia telah mati suri.¹⁰ Persoalan ini agaknya semakin paralel dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini yang sedang dihadapkan pada problem sekaligus tantangan global berbentuk pasar bebas internasional; baik dalam skala lokal, regional maupun internasional berupa: AFTA, NAFTA, APEC dan MEA.

Fenomena ini muncul disebabkan oleh landasan pendidikan yang lebih bersandar pada faham materialisme yang mementingkan sisi luar dari manusia dan aliran positivisme yang menekankan pada *link and match* dari sebuah produk pendidikan.¹¹ Oleh sebab itu, pendidikan harus berlandaskan pada nilai filosofis yang tidak mengalienasikan jiwa manusia terhadap humanitasnya sendiri, artinya nilai filosofis pendidikan tersebut harus mampu mengkonstruksi nilai humanitas yang universal seperti nilai humanitas yang bersumber pada spiritual/transcendental atau yang terkodifikasi dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah (Al-Hadits). Beda halnya dengan Yunahar Ilyas dalam bukunya "Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an", seperti yang dikutip oleh M. Sukidi, mengatakan bahwa pendidikan yang masih sangat dipengaruhi oleh intervensi kekuasaan akan mengakibatkan produk pendidikan lebih banyak menghasilkan manusia-manusia robot dan mekanis, daripada manusia yang imajinatif, kreatif dan berbudaya.¹² Sampelnya adalah pandangan masyarakat Indonesia yang mengklaim bahwa pendidikan diinterpretasikan hanya untuk mengejar sertifikat atau ijazah yang diakuinya dengan sekuat tenaga bahkan dengan berbagai cara, termasuk cara-cara yang licik.¹³ Atau masyarakat Indonesia yang masih beranggapan bahwa Ujian Akhir Negara (UAN) menjadi parameter normatif pendidikan Indonesia, dan secara evolutif sistem pendidikan Indonesia pelan-pelan berupaya menciptakan manusia-manusia yang hanya sanggup berhadapan dengan kertas ujian dan tidak *capable* berperan sebagai *problem solver* untuk setumpukan krisis multidimensi Negara Indonesia.¹⁴

Pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang salah dengan penyelenggaraan pendidikan kita? Pertanyaan ini merupakan langkah konstruktif, jika dilakukan dalam rangka mendiagnosis mutu pendidikan yang rendah.¹⁵ Abdurrahman Saleh mencatat, sedikitnya ada tiga faktor yang

⁹ Fadhil al Djamali, *Menerobos Krisis Pendidikan Islam*, (Jakarta: Golden Press, 1992), hal. 19.

¹⁰ Winarno Surachmad, "Pendidikan Nasional Mati Sui?" Kompas, (Jakarta), Edisi Mei 2001.

¹¹ M Sukidi, *Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Mikraj, 2005), hal. 211.

¹² *Ibid.*, hal. 212.

¹³ Ainurrafiq Dawam, "Emoh Sekolah: Menolak "Komersialisasi Pendidikan" dan "Kanibalisasi Intelektual", *Menuju Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Inspeal Ahimsakarya Press, 2003), hal. 31.

¹⁴ Syarif Hidayat Santoso, "UAN itu Perlu, Tapi ..." Jawa Pos, (Surabaya), 8 Mei 2004.

¹⁵ Rendahnya mutu pendidikan nasional ini dapat dilihat dari laporan *World Bank* tahun 1998 bahkan sampai tahun 2010 pun juga sulit untuk beranjak ke tingkat sepuluh besar yang menunjukkan bahwa dalam beberapa dasawarsa terakhir, pendidikan di Indonesia mengalami kendala besar dan serius, satu diantaranya

menyebabkan mutu pendidikan kita tidak mengalami peningkatan mutu secara merata. *Pertama*, kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan tidak menggunakan pendekatan *education production function* atau analisis input-output tidak dilaksanakan secara konsekuen. *Kedua*, penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan secara birokratik/ sentralistik, dan *ketiga*, peran serta masyarakat, khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan lebih bersifat dukungan dana, bukan pada proses pendidikan (pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi dan akuntabilitas).¹⁶

Sistem penyelenggaraan pendidikan seperti tersebut di atas menyebabkan pendidikan Indonesia terpuruk. Hal ini bisa dilihat dari beberapa hasil penelitian beberapa tahun yang lalu sebagaimana berikut:

Pertama, menurut laporan badan PBB yang membawahi pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan (UNESCO) tentang indeks pembangunan pendidikan atau *Education Development Index* (EDI) menunjukkan bahwa Indonesia berada pada posisi ke-66 dari 127 negara. Indeks yang dikeluarkan pada tahun 2011 ini jauh menurun dari tahun sebelumnya, dan lebih rendah dibandingkan dengan Brunei Darussalam (34), serta terpaut empat peringkat dari Malaysia (65). Rendahnya EDI Indonesia ini disebabkan rendahnya nilai Indonesia pada empat parameter penilaian yakni keterjangkauan dan ketersediaan akses pendidikan, termasuk angka partisipasi kasar (APK) jenjang pendidikan dasar; tingkat melek aksara pada kelompok usia 15 tahun ke atas; kesetaraan jender dalam melek literasi; dan kualitas pendidikan yang di antaranya diukur dari tingkat kelulusan, kemampuan baca tulis hitung (calistung), dan rasio murid-guru.¹⁷

Kedua, hasil penelitian Program Pembangunan PBB (UNDP) tahun 2011 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Indonesia menduduki urutan ke-124 dari 187 negara yang disurvei dengan skor 0,617. Peringkat ini turun dari peringkat 108 pada tahun 2010. Di kawasan ASEAN, Indonesia hanya unggul dari Vietnam yang memiliki nilai IPM 0,593, Laos dengan nilai IPM 0,542, Kamboja dengan nilai IPM 0,523, dan Myanmar dengan nilai IPM 0,483.¹⁸

Ketiga, hasil survey yang dilakukan *The Political and Economic Risk Consultancy* (PERC), yang berbasis di Hongkong pada tahun 2001 lalu mengenai mutu pendidikan di Asia, menempatkan mutu pendidikan Indonesia berada pada urutan ke-12 setelah Vietnam.¹⁹ Bahkan kualitas pendidikan Indonesia yang rendah itu, juga ditunjukkan data Balitbang tahun 2003 bahwa dari

menyangkut manajemen pendidikan yang terpusat, terutama yang berkaitan dengan penentuan program, perencanaan, dan pembiayaan pendidikan sehingga berdampak pada rendahnya kualitas pendidikan nasional. Syaukani HR, *Titik Temu dalam Dunia Pendidikan*, (Jakarta: Nuansa Madani, 2002), hal. 5.

¹⁶ Abd. Rahman Saleh, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hal. 243-244.

¹⁷ [http:// okezone. com](http://okezone.com). 23 Oktober 2012.

¹⁸ [http:// kompas. com](http://kompas.com). 17 April 2012.

¹⁹ Laporan *The Jakarta Post* Edisi 3 September 2001 sebagaimana dikutip Suwito dalam Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Sejarah Pemikiran dan Pendidikan Islam di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2002 berjudul "Pendidikan yang Memberdayakan", Hal. 7. Bahkan Guru Besar Universitas Waseda Jepang yaitu Toshiko Kinoshita mengemukakan bahwa sumber daya manusia Indonesia masih sangat lemah untuk mendukung perkembangan industri dan ekonomi. Penyebabnya karena pemerintah selama ini tidak pernah menempatkan pendidikan sebagai prioritas terpenting. Tidak ditematkannya pendidikan sebagai prioritas terpenting, karena masyarakat Indonesia mulai dari masyarakat awam hingga politisi dan pejabat pemerintah, hanya berorientasi mengejar uang untuk memperkaya diri sendiri dan tidak pernah berfikir panjang. Kompas (Jakarta), 24 Mei 2002.

146. 052 Sekolah Dasar (SD) di Indonesia ternyata hanya delapan sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori *The Primary Years Program* (PYP). Dari 20. 918 Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Indonesia ternyata juga hanya delapan sekolah yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori *The Middle Years Program* (MYP), dan dari 8. 036 Sekolah Menengah Atas (SMA) di Indonesia ternyata hanya tujuh sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori *The Diploma Program* (DP).

Dalam konteks keindonesiaan, telah terjadi beberapa penyimpangan perilaku masyarakat yang bertentangan dengan norma-norma agama dan masyarakat. Penyimpangan-penyimpangan tersebut bahwa beberapa gadis SMU telah menjadi “anak ayam” dimana guru menjadi mucikarnya di sebuah SMU di Cirebon telah membuat heboh masyarakat Indonesia belakangan ini. Bahkan mereka melakukan tindakan yang amoral lagi. Dan, menurut banyak berita, banyak siswi SMU di berbagai kota besar, ternyata berprofesi ganda, bukan hanya sebagai siswi, tetapi juga pelacur kelas atas. Aspek kesucian hidup dan pergaulan sudah disisihkan ke tong sampah, seperti halnya. Berbagai macam psikotropika dan narkoba juga begitu banyak beredar di kalangan anak sekolah. Lebih mengerikan, penjual dan pembeli juga adalah orang-orang yang masih berstatus siswa. Mereka menjadi pengedar dan sekaligus juga pengguna. Kehidupan yang rusak seperti ini kerap kali disertai dengan berbagai pesta yang berujung pada tindakan amoral di kalangan remaja. Anak-anak remaja ini tidak lagi mempertimbangkan rasa takut untuk hidup rusak, merusak nama baik keluarga dan masyarakatnya. Berbagai tawuran anak sekolah juga telah membuat resah masyarakat di berbagai tempat di beberapa kota besar di Indonesia. Bahkan, kejadian-kejadian sejenis seringkali sulit diatasi oleh pihak sekolah sendiri, sampai-sampai melibatkan aparat kepolisian dan berujung dengan pemenjaraan, karena merupakan tindakan kriminal yang bisa merenggut nyawa. Seperti halnya nyawa manusia tidak ada harganya, hidup itu begitu murah dan rendah nilainya. Disamping itu, etos kerja yang buruk, rendahnya disiplin diri dan kurangnya semangat untuk bekerja keras, keinginan untuk memperoleh hidup yang mudah tanpa kerja keras, nilai materialisme (*materialism, hedonism*) menjadi gejala yang umum dalam masyarakat.

Berbagai penyakit masyarakat di atas, masih bisa terus diperpanjang dengan berbagai kasus lainnya, seperti pemerasan siswa terhadap siswa lain, kecurangan dalam ujian, dan berbagai tindakan yang tidak mencerminkan moral siswa yang baik. Fenomena ini tergambar dalam Al-Qur'an Surat Ibrahim ayat 26 yang berbunyi:

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ

قَرَارٍ ﴿٢٦﴾

Artinya: Dan perumpamaan kalimat (kebijakan) yang buruk bagaikan pohon yang buruk, yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi; tidak dapat tegak sedikitpun. (Ibrahim:26)

Untuk mengatasi berbagai masalah kemerosotan budaya dan karakter bangsa tersebut, banyak pihak berkeyakinan bahwa pendidikan masih berperan penting. Pendidikan dianggap sebagai alternatif yang bersifat preventif yang diharapkan dapat mengembangkan budaya dan karakter generasi muda bangsa kita dalam berbagai aspek kehidupan, yang dapat memperkecil atau mengurangi penyebab berbagai masalah kemerosotan budaya dan karakter bangsa.

Dari pendapat yang dikemukakan oleh para pakar, pemuka/ tokoh masyarakat, para pemerhati pendidikan, dan masyarakat luas di berbagai media massa, serta forum seminar dan sarasehan yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional pada awal tahun 2010 menggambarkan adanya kebutuhan masyarakat yang kuat akan perlunya pendidikan budaya dan karakter bangsa. Pemerintah telah melihat bahwa kebutuhan tersebut, secara imperatif adalah untuk mencetak manusia Indonesia sebagaimana yang dirumuskan dalam Tujuan Pendidikan Nasional

Oleh karena itu, dalam rangka menjawab permasalahan-permasalahan di atas, maka lembaga pendidikan harus memiliki strategi jitu dalam upaya meningkatkan dan memantapkan kualitasnya agar mampu bersaing di era globalisasi dengan melahirkan manusia-manusia yang berdaya saing tinggi, tangguh dan mempunyai karakter kuat. Karena diyakini, daya saing yang tinggi inilah agaknya yang bisa menentukan tingkat kemajuan efisiensi dan kualitas bangsa untuk dapat memenangi persaingan era pasar bebas yang ketat tersebut. Salah satu strategi yang dapat dikembangkan oleh lembaga pendidikan yaitu dengan strategi pengembangan melalui pendidikan karakter.

2 Pengembangan Mutu Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Karakter

Organisasi atau lembaga pendidikan dapat hidup terus atau *survive*, apabila organisasi tersebut dapat memenangkan persaingan yang terjadi di lingkungan eksternalnya, kemenangan dapat dicapai apabila organisasi tersebut mempunyai strategi yang efektif dalam menghadapi lingkungan eksternalnya. Strategi merupakan kiat, cara dan taktik terarah yang dirancang pada tujuan strategis organisasi. Di bawah ini beberapa pengertian strategi yang merupakan kutipan dari beberapa pernyataan pakar manajemen strategis, diantaranya menyatakan²⁰:

- 1) Chadler (1962), strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas pengalokasian sumberdaya.
- 2) Learned, et all (1965), strategi merupakan alat untuk menciptakan keunggulan bersaing.
- 3) Argyris (1985), strategi merupakan respon secara terus menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi.
- 4) Porter,²¹ strategi adalah alat yang penting untuk mencapai keunggulan bersaing.
- 5) Salusu,²² strategi adalah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang menguntungkan

Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang maupun damai. Secara eksplisit, strategi adalah rencana tindakan yang menjabarkan alokasi sumber daya dan aktivitas lain untuk menanggapi lingkungan dan membantu organisasi mencapai sasarannya. Sementara itu, Afifuddin²³ menyatakan bahwa suatu tindakan atau kegiatan yang tidak didahului

²⁰ M. Ali Ramdhani, *Manajemen Strategi*, (Bandung: Insan Akademika, 2004), hal. 5-6.

²¹ Porter, *Competitive Advantage*, Mac. Millan Publishing.

²² J. Salusu, *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non-Profit*, (Jakarta: Grasindo, 2003).

²³ Afifuddin, *Perencanaan dan Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Insan Mandiri, 2005), hal. 9.

perencanaan yang tepat, maka tujuan atau sasaran kegiatan itu tidak akan tercapai secara efektif dan efisien. Tanpa perencanaan, jalannya suatu usaha akan bersifat untung-untungan. Keputusan yang diambil hanya akan merupakan pilihan-pilihan sesaat dan sempit. Jadi, intinya strategi adalah pilihan untuk melakukan aktivitas yang berbeda atau untuk melaksanakan aktivitas dengan cara berbeda dari pesaingnya. Beberapa pertanyaan yang sering diajukan para manajer seperti:

- 1) Perubahan dan *tren* apa yang terjadi pada lingkungan yang kompetitif?
- 2) Siapakah konsumen kita?
- 3) Produk atau pelayanan apa yang seharusnya kita tawarkan?
- 4) Bagaimana kita dapat menawarkan produk dan pelayanan seefisien mungkin?

Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas dapat membantu manajer membuat pilihan mengenai bagaimana memposisikan lembaga pendidikan yang penuh dengan organisasi pesaing.

2.1 Pengertian Pendidikan

Pendidikan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.²⁴ Pendidikan secara etimologis juga berarti proses, perbuatan, dan cara mendidik.²⁵

Dalam khazanah Islam, terdapat sejumlah istilah yang merujuk kepada pengertian pendidikan seperti *tarbiyah*, *ta'dib*, *ta'lim*, *tadris*, dan *tabyin*. Telah banyak dilakukan diskusi tentang istilah mana yang paling tepat untuk pendidikan. Dalam hal ini, penulis mencukupkan analisis yang diberikan Maksud dan Abuddin Nata. Maksud dalam bukunya *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya* berkesimpulan bahwa istilah *tarbiyah* dianggap lebih tepat karena konotasi ketuhanan di dalamnya sangat kuat. Dia melanjutkan argumennya, walaupun kegiatan pendidikan merupakan kegiatan manusia, tetapi pendidikan tidak lepas dari peranan Tuhan. Selain itu, dia mengajukan argumen lain, bahwa *ta'lim*, *tadris*, *ta'dib*, dan *tabyin* sudah terkandung dalam pengertian *tarbiyah*.²⁶ Abudin Nata bahkan berpendapat bahwa term *tarbiyah* dapat mencakup pengertian seluruh istilah yang sering disepadankan dengan kata pendidikan seperti *tahzib*, *ta'dib*, *ta'lim*, *siyasah*, *mawaa'iz* dan *tadrib*.²⁷

Sedangkan secara terminologis, pendidikan menurut penelitian Azra telah didefinisikan secara berbeda-beda oleh berbagai kalangan, yang banyak dipengaruhi perspektif masing-masing. Namun, semua pandangan yang berbeda itu bertemu kepada kesimpulan bahwa pendidikan merupakan proses penyiapan generasi muda untuk menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidupnya secara lebih efektif dan efisien.²⁸ Sudut pandang dalam mendefinisikan pendidikan dapat dilihat berikut ini:

Pendidikan, menurut Ahmad D. Marimba adalah “bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya

²⁴ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 232.

²⁵ *Ibid*, 232

²⁶ Maksud, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta: Logos, 1999), hal. 11-25.

²⁷ Abuddin Nata, “*Konsep Pendidikan Ibn Sina*,” Disertasi, (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah), hal. 24.

²⁸ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi menuju Millenium Baru*, (Jakarta: Logos, 2002), hal. 2.

kepribadian yang utama”.²⁹ Definisi ini relatif lengkap mengingat definisi tersebut mencakup proses, subyek, obyek, dan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Bila pendidikan itu diberi sifat Islam, maka kepribadian utama yang menjadi tujuan pendidikan itu, menurut Marimba, haruslah menurut ukuran-ukuran Islam.³⁰

Yusuf al-Qardhawy berpendapat bahwa pendidikan Islam tidak mengkhususkan perhatiannya pada aspek rohani dan akhlak, tidak membatasi usahanya pada pembinaan akal dan pikiran, tidak menjadikan cita-cita utamanya pada latihan kemiliteran, dan tidak pula terbatas pada pendidikan kemasayarakatan.³¹ Secara tegas al-Qardhawy menjelaskan bahwa pendidikan Islam adalah “pendidikan manusia seutuhnya: akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya. Karena pendidikan Islam menyiapkan manusia untuk hidup, baik dalam keadaan senang atau susah dan menyiapkan peserta didik untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatannya”.³² Ahmad Tafsir lebih luas mendefinisikan pendidikan Islam ialah bimbingan yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam, atau pendidikan Islam ialah bimbingan terhadap seseorang agar ia menjadi muslim semaksimal mungkin.³³

Menurut Undang-undang No. 20/ 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Dari definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa unsur-unsur yang ada dalam pendidikan adalah proses, pemberi pengaruh, peserta didik, dan tujuan pendidikan. Bila dikaitkan dengan topik penelitian ini, maka pendidikan di sini lebih ditekankan kepada proses penyiapan peserta didik untuk menuju tujuan yang telah ditetapkan pondok pesantren, agar mereka bisa bertahan di tengah-tengah perkembangan kemajuan masyarakat.

Dalam struktur sosial kebudayaan, pendidikan Islam paling tidak mengandung empat unsur yang kemudian dijadikan sebagai dustur kebudayaan suatu bangsa, yaitu:

- 1). Unsur etika (moral) untuk membentuk ikatan-ikatan sosial
- 2). Unsur estetika untuk membentuk cita rasa umum
- 3). Logika terapan untuk menentukan bentuk-bentuk aktivitas umum
- 4). Teknologi terapan yang sesuai dengan semua jenis yang ada dalam ragam masyarakat atau industri.³⁴

²⁹ Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: al-Ma’arif, 1989), hal. 19.

³⁰ *Ibid*, 23.

³¹ Yusuf Al-Qardhawy, *Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan al-Banna*, Terjemahan Bustami A. Gani dan Zainal Abidin Ahmad dari *Al-Tarbiyah Al-Islamiyah wa Madrasah Hasan Al-Banna* (Jakarta: Bulan Bintang), hal. 39.

³² *Ibid*, 39

³³ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), hal. 32.

³⁴ Malik bin Nabi, *Membangun Dunia Baru Islam*, Terj. Afif Muhammad dan Abdul Adhiem, (Bandung: Mizan, 1995), hal. 103.

Merujuk pada batasan di atas, maka praktik pendidikan Islam merupakan penjabaran keempat unsur tersebut. Pendidikan Islam seharusnya menjadi sarana pembentukan situasi “pengetahuan” dan berakhlak mulia. Prosesnya bukan berupa rangkaian indoktrinasi pengetahuan dan mencampakkan keempat unsur pendidikan di atas dalam bingkai yang terpilah-pilah. Proses pendidikan yang dilakukan seharusnya merupakan proses pemberian sejumlah informasi mengenai pengalaman untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Di sini peserta didik diarahkan untuk menemukan bentuk pengetahuan yang diinginkan, sesuai dengan kebutuhan masa depannya yang berbeda dengan lingkungan dan persoalan yang dialami seorang pendidik.

Bagi Abduh, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang dalam prosesnya mampu mengembangkan seluruh *fitrah* peserta didik, terutama *fitrah* akal dan agamanya. Dengan *fitrah* ini, peserta didik dapat mengembangkan daya berpikir secara rasional. Sementara melalui *fitrah* agama, tertanam pilar-pilar kebaikan pada diri peserta didik yang kemudian terimplikasi dalam seluruh aktivitas hidupnya.³⁵ Dalam konteks ini, tugas utama pendidikan agama, dalam perspektif Islam adalah menciptakan sosok peserta didik berkepribadian paripurna (*insan kamil*). Untuk itu, menurut Al-Syaibani, pelaksanaan pendidikan Islam seharusnya lebih menekankan pada aspek agama dan akhlak, di samping intelektual-rasional. Penekanannya bersifat menyeluruh dan memerhatikan seluruh potensi yang dimiliki peserta didik, yang meliputi potensi intelektual, psikologis, sosial, dan spiritual secara seimbang dengan pelbagai ilmu pengetahuan lainnya (seni, pendidikan jasmani, militer, teknik, bahasa asing, dan lainnya), sesuai dengan dinamika perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat di mana pendidikan itu dilaksanakan.

2.2 Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)

Para ahli pada abad ke-20 mengembangkan manajemen sumber daya manusia (MSDM) menjadi suatu bidang studi yang khusus mempelajari peranan dan hubungan manusia dalam mencapai tujuan organisasi. Perkembangan manajemen sumber daya manusia didorong oleh masalah-masalah ekonomis, politis, dan sosial.³⁶

Menurut Hasibuan mengemukakan bahwa, “Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoretis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/ jabatan melalui pendidikan dan latihan”.³⁷

Penggunaan istilah pengembangan juga dikemukakan Wexley dan Yulk, pengembangan merupakan istilah yang berhubungan dengan usaha-usaha berencana yang diselenggarakan untuk mencapai penguasaan skill, pengetahuan dan sikap-sikap pegawai atau anggota organisasi.³⁸

Pengembangan lebih difokuskan pada peningkatan kemampuan dalam pengambilan keputusan dan memperluas hubungan manusia (*human relation*) bagi manajemen tingkat atas dan menengah. Pengembangan merupakan suatu proses pendidikan jangka panjang yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisir di mana pegawai managerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis guna mencapai tujuan yang umum.

³⁵ Muhammad Abduh, *al-Madaaris al-Tazhiziyat wa al-Madaaris al-'Aliyat*, dalam 'Imarah (ed.), *al-A'mal al-Kamil li al-Kamil li al-Imam Muhammad Abduh*, Juz III, (Beirut: Al-Muassasah al-Arabiyyah li al-Dirasah wa al-Nashar, 1972), hal. 117.

³⁶ *Ibid.*, hal. 15.

³⁷ *Ibid.*, hal. 69.

³⁸ Mangkunegara, *Manajemen*, hal. 43.

Pengembangan manajemen sumber daya (MSDM) pada hakekatnya mengacu pada pengembangan sumber daya manusia itu sendiri. Menurut Suryadi, pengembangan sumber daya manusia adalah suatu sarana investasi yang terus berkembang sepanjang zaman. Dalam hal ini salah satunya pendidikan dapat dianggap sebagai sarana investasi, yang dianggap mampu membantu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian tenaga kerja sebagai modal untuk dapat bekerja lebih produktif sehingga dapat meningkatkan penghasilannya di masa mendatang.

Adapun tujuan pengembangan menurut Hasibuan, hakikatnya menyangkut hal-hal berikut: (a). Produktivitas Kerja, (b). Efisiensi, (c). Kerusakan, (d). Kecelakaan, (e). Pelayanan, (f). Moral, (g). Karir, (h). Konseptual, (i). Kepemimpinan, (j). Balas Jasa, dan (k). Konsumen.³⁹

Dengan demikian pengembangan manajemen sumber daya manusia (MSDM) memicu pada aspek yang lebih dari sekedar pelatihan (*training*), di mana ada upaya yang berbasis jangka panjang dan senantiasa mengorganisir secara berkesinambungan dengan meningkatkan kemampuan konseptual dan lain-lain.

2.3 Mutu dalam Pendidikan

Istilah bermutu⁴⁰ sering diperbincangkan dalam kehidupan sehari-hari, umumnya digunakan dalam arti “*bermutu baik*”, misalnya sekolah bermutu, pesantren bermutu, makanan bermutu atau pelayanan bermutu dan lain-lain. Dalam bahasa Inggris juga demikian: “*quality food quality service*,” jadi tidak selalu disebut kata “*baik*” atau “*good*” atau *good quality*”. Dalam pemahaman umum, mutu berarti “sifat yang baik” atau “*goodness*”. Tapi yang dimaksud dengan “sifat yang baik” tidak selalu jelas, tolok ukurnya perlu diteliti.⁴¹

Dalam perbincangan sehari-hari, istilah “bermutu” umumnya digunakan dalam arti “bermutu baik”, misalnya sekolah bermutu, makanan bermutu, atau pelayanan bermutu dan lain-lain. Menurut Suryadi mutu dalam arti relatif, ukuran mutu adalah kebutuhan pelanggan. Dengan kata lain, pelanggan pada hakikatnya ikut menentukan mutu, jadi bukan hanya produsen yang menentukannya kebutuhan pelanggan berubah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan

³⁹ Hasibuan, *Manajemen*, hal. 70-72.

⁴⁰ Kata kualitas masuk ke dalam bahasa Indonesia dari bahasa Inggris, yaitu *quality*, dan kata ini sesungguhnya berasal dari bahasa Latin, yaitu *qualitas* yang masuk ke dalam bahasa Inggris melalui bahasa Prancis kuno, yaitu *qualité*. Dalam kamus lengkap (kamus komprehensif) bahasa Inggris, kata itu mempunyai banyak arti. Tiga diantaranya: (1) suatu sifat atau atribut yang khas dan membuat berbeda; (2) standar tertinggi sifat kebaikan; dan (3) memiliki sifat kebaikan tertinggi. Daulat P Tampubolon, *Perguruan Tinggi Bermutu: Paradigma Baru Manajemen Pendidikan Tinggi Menghadapi Tantangan Abad Ke-21*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 106. Maka dilihat dari segi korelasi mutu dengan pendidikan Islam (pesantren), maka mutu dapat diartikan sebagai kemampuan pesantren dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan pesantren.

⁴¹ Diding Nurdin, *Manajemen Sekolah Berbasis Mutu*, Disertasi (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2005), hal. 30.

masyarakat. Sedangkan menurut Juran mengemukakan bahwa: Mutu adalah kesesuaian dengan tujuan atau manfaatnya.⁴²

Dengan demikian, secara umum pengertian mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan.

Adapun mutu dalam pendidikan dengan definisi yang relatif mempunyai dua aspek: (a) pengukuran kemampuan lulusan sesuai dengan tujuan sekolah yang ditetapkan dalam kurikulum, (b) pengukuran terhadap pemenuhan kebutuhan dan tuntutan pelanggan, yaitu orang tua siswa dan masyarakat.⁴³

Orientasi pada mutu sangat penting bagi sebuah organisasi atau lembaga pendidikan. Ada beberapa alasan pentingnya mutu sebagai sekolah atau lembaga pendidikan. Russel mengidentifikasi enam peran pentingnya mutu: (1). Meningkatkan reputasi organisasi, (2). Menurunkan biaya, (3). Meningkatkan pangsa pasar, (4). Dampak internasional, (5). Adanya pertanggungjawaban produk, (6). Untuk penampilan produk, (7). Mewujudkan mutu yang dirasakan penting.

Mutu dalam pendidikan memiliki Karakteristik yang khas, karena pendidikan bukanlah industri. Dalam pendidikan, produk pendidikan itu bukanlah *goods* (barang) tetapi *services* (layanan). Pemakai (pelanggan) pendidikan ada yang bersifat internal dan eksternal. Guru dan siswa adalah pemakai jasa pendidikan yang bersifat internal. Sedangkan orang tua, masyarakat dan dunia kerja adalah pemakai eksternal jasa pendidikan. Pemakai ini perlu mendapat perhatian karena mutu dalam pendidikan harus memenuhi kebutuhan, harapan, dan keinginan semua pemakai (*stakeholders*). Dalam hal ini, pemakai yang menjadi fokus utama pendidikan adalah "*leaners*" (peserta didik). Peserta didik yang menjadi alasan utama diselenggarakan pendidikan, dan peserta didik pula yang menyebabkan keberadaan lembaga maupun sistem pendidikan.

Menurut Sallis⁴⁴ dalam pendidikan yang termasuk pelanggan internal (*internal customer*) dan eksternal (*external customer*). Internal: guru, karyawan, pelajar, orang tua siswa. Eksternal: perguruan tinggi, industri, bisnis, perusahaan, militer dan masyarakat luas. Pelanggan pendidikan perlu dipahami oleh pengelola, kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya untuk bekerjasama mewujudkan mutu pendidikan.

Aspek mutu pendidikan harus ditingkatkan, karena selama ini mutu pendidikan kita rendah. Banyak kritik dilontarkan antara lain masalah nilai akademis kurang menggembirakan, di samping itu masalah kedisiplinan, kejujuran, moral dan etika, kreativitas dan kemandirian, serta sikap demokratis yang tidak mencerminkan tingkat mutu yang diharapkan masyarakat luas. Dewasa ini banyak kritikan yang menyatakan pendidikan moral atau karakter mengalami kemunduran. Selama

⁴² J M Juran, *on Quality By Design*, Terj. Bambang Hartono *Merancang Mutu*, (Jakarta: Pustaka Binawan Pressido, 1995), hal. 10-13.

⁴³ Hari Sudrajat, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Implementasi KBK*, (Bandung: CiptaCekas Grafika, 2005), hal. 2.

⁴⁴ Edward Sallis, *Total Quality Management in Education*, (London: Kogan Page Limited, 1993).

ini pendidikan nilai diajarkan oleh guru dan tidak pernah didiskusikan mengenai nilai mana yang harus diajarkan dan bagaimana mengajarkannya.⁴⁵

2. 4 Pendidikan Karakter

Istilah pendidikan karakter adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pembelajaran kepada siswa dengan mengembangkan beragam perilaku seperti: moral, sopan santun, berperilaku baik, sehat, kritis, sukses, sesuai dan/ atau diterima secara makhluk-sosial. Konsep pendidikan karakter yang sekarang dan di masa lalu mencakup istilah sosial dan emosional belajar, penalaran moral/ pengembangan kognitif, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan kesehatan, pencegahan kekerasan, berfikir kritis, penalaran etis, dan resolusi.

Pendidikan karakter merupakan sebuah istilah yang semakin hari semakin mendapatkan pengakuan dari masyarakat Indonesia saat ini. Terlebih dengan dirasakannya berbagai ketimpangan hasil pendidikan dilihat dari perilaku lulusan pendidikan formal saat ini, semisal korupsi, perkembangan seks bebas dikalangan remaja, narkoba, tawuran, pembunuhan, perampokan oleh remaja, dan pengangguran lulusan sekolah menengah atas.

Karakter, menurut pengamat Filosof kontemporer Michael Novak adalah perpaduan harmonis seluruh budi pekerti yang terdapat dalam ajaran agama. Tidak ada seorang pun yang memiliki semua jenis budi pekerti, karena semua orang punya kekurangan. Orang punya budi pekerti mengagumkan dapat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Karakter terbentuk dari tiga komponen saling terkait, yaitu meliputi pengetahuan moral, perasaan moral dan perilaku moral.⁴⁶

Sedangkan pendidikan karakter menurut Ratna Megawangi adalah sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif kepada lingkungannya.⁴⁷

Definisi lain dikemukakan oleh Fakry Gaffar adalah sebuah proses transformasi nilai-nilai kehidupan untuk dikembangkan dalam kepribadian seseorang sehingga menjadi satu dalam perilaku kepribadian orang itu. Dalam definisi tersebut, ada tiga ide pikiran penting, yaitu: 1) Proses transformasi nilai-nilai, 2) Ditumbuhkembangkan dalam kepribadian, dan 3) Menjadi satu dalam perilaku.⁴⁸

Dalam konteks kajian P3, mendefinisikan pendidikan karakter dalam setting sekolah sebagai “Pembelajaran yang mengarah pada penguatan dan pengembangan perilaku anak secara utuh yang didasarkan pada suatu nilai tertentu yang dirujuk oleh suatu lembaga pendidikan”. Definisi ini mengandung makna:

- 1) Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang terintegrasi dengan pembelajaran yang terjadi pada semua mata pelajaran.

⁴⁵ Thomas Lickona dalam Pratiwi Pujiastuti, 2013, Pendidikan Untuk Pencerahan dan Kemandirian Bangsa, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 2013), hal. 277.

⁴⁶ Thomas Lickona, Pendidikan Karakter (Panduan Lengkap Mendidik Siswa Menjadi Pintar dan Baik), Bandung: Nusa Media, 2013.

⁴⁷ Ratna Megawangi, Pendidikan Karakter; Solusi yang tepat untuk membangun bangsa. Bogor: Indonesia Heritage Foundation. 2004 hal. 1

⁴⁸ Mohammad Fakry Gaffar, Pendidikan Karakter berbasis Islam, Yogyakarta, 2010

- 2) Diarahkan pada penguatan dan pengembangan perilaku anak secara utuh, asumsinya anak merupakan organisme manusia yang memiliki potensi untuk dikembangkan dan dikuatkan.
- 3) Penguatan dan pengembangan perilaku didasari oleh nilai yang dirujuk sebuah lembaga pendidikan.⁴⁹

Persoalan budaya dan karakter bangsa akhir-akhir ini telah banyak menyita perhatian berbagai kalangan, baik pemerintah maupun seluruh masyarakat Indonesia. Sorotan mengenai persoalan budaya dan karakter bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan, yang tertuang dalam berbagai tulisan di media cetak, pandangan berbagai tokoh masyarakat, ilmuwan, dan agamawan, menggambarkan adanya keprihatinan terhadap perkembangan budaya dan karakter bangsa kita akhir-akhir ini. Dahulu bangsa kita yang dikenal oleh bangsa lain sebagai bangsa yang ramah, santun, arif, dan menghargai orang/ suku/ agama lain, sekarang malahan sebaliknya. Banyak kita saksikan konflik horizontal dan kekerasan di mana-mana, baik yang mengatasnamakan agama, suku, maupun perbedaan kepentingan. Belum lagi masalah korupsi, mafia pajak, mafia hukum telah mewarnai berita-berita di media massa kita.

Pendidikan merupakan upaya yang dilakukan secara terencana dalam mengembangkan potensi peserta didik, agar memiliki sistem berpikir, sistem nilai, moral, dan keyakinan yang diwariskan oleh masyarakatnya untuk berkembang sesuai kehidupan pada masa kini dan masa mendatang. Sedangkan karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (*virtues*) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Dalam hal yang senada, Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Suyanto (2010), juga menyatakan bahwa karakter adalah “cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara”.

Pendidikan budaya dan karakter secara jelas telah tertuang dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pengembangan karakter bangsa dapat dilakukan melalui pengembangan karakter individu seseorang yang akan berkembang ke lingkungan sosial dan lingkungan budaya. Dengan kata lain, pengembangan budaya dan karakter bangsa hanya dapat dilakukan dalam suatu proses pendidikan yang tidak melepaskan peserta didik dari lingkungan sosial, budaya masyarakat, dan budaya bangsa berdasarkan ideologi Negara, yaitu Pancasila. Pengembangan itu harus dilakukan melalui perencanaan yang baik, pendekatan yang sesuai, dan pendidikan serta pembelajaran yang sesuai, dilakukan secara bersama oleh semua pendidik melalui semua mata pelajaran, dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pengembangan budaya sekolah. Pendidikan budaya dan karakter bangsa dilakukan melalui pendidikan nilai-nilai atau kebajikan yang menjadi nilai dasar budaya dan karakter bangsa. Adapun landasan pedagogis pendidikan budaya dan karakter bangsa adalah pengembangan nilai-nilai yang berasal dari pandangan hidup atau ideologi bangsa Indonesia, agama, budaya, dan nilai-nilai yang telah terumuskan dalam tujuan pendidikan nasional.

⁴⁹ Johar pernama, Pendidikan karakter kajian teori dan praktek di Sekolah. PT Remaja Rosda Karya. Bandung 2011 hal 6

Pendidikan yang berbasis karakter adalah pendidikan yang menerapkan prinsip-prinsip dan metodologi ke arah pembentukan karakter anak bangsa pada peserta didiknya melalui kurikulum terintegrasi yang dikembangkan di sekolah.

Kerangka pengembangan karakter dan budaya bangsa melalui pembelajaran di kalangan tenaga pendidik dirasakan sangat penting. Sebagai agen perubahan, pendidik diharapkan mampu menanamkan ciri-ciri, sifat, dan watak serta jiwa mandiri, tanggung jawab, dan cakap dalam kehidupan kepada peserta didiknya. Di samping itu, karakter tersebut juga sangat diperlukan bagi seorang pendidik karena melalui jiwa ini, para pendidik akan memiliki orientasi kerja yang lebih efisien, kreatif, inovatif, produktif serta mandiri.

Pendidikan saat ini hanya mengedepankan penguasaan aspek keilmuan dan kecerdasan peserta didik. Jika peserta didik sudah mencapai nilai atau lulus dengan nilai akademik memadai/ di atas KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal), pendidikan dianggap sudah berhasil. Pembentukan karakter dan nilai-nilai budaya bangsa di dalam diri peserta didik semakin terpinggirkan. Rapuhnya karakter dalam kehidupan berbangsa bisa membawa kemunduran peradaban bangsa. Pada hal, kehidupan masyarakat yang memiliki karakter kuat akan semakin memperkuat eksistensi suatu bangsa dan negara.

Pengembangan pendidikan berbasis karakter perlu menjadi program nasional. Dalam pendidikan, pembentukan karakter dan budaya bangsa pada peserta didik tidak harus masuk kurikulum. Nilai-nilai yang ditumbuh kembangkan dalam diri peserta didik berupa nilai-nilai dasar yang disepakati secara nasional. Nilai-nilai yang dimaksudkan di antaranya adalah kejujuran, dapat dipercaya, kebersamaan, toleransi, tanggung jawab, dan peduli kepada orang lain.

2.5 Urgensi Pendidikan Karakter Bagi Peningkatan Kualitas SDM

Sejak 2500 tahun yang lalu, Socrates telah berkata bahwa tujuan paling mendasar dari pendidikan adalah untuk membuat seseorang menjadi *good and smart*. Dalam sejarah Islam, sekitar 1500 tahun yang lalu Muhammad saw, Sang Nabi terakhir dalam ajaran Islam, juga menegaskan bahwa misi utamanya dalam mendidik manusia adalah untuk mengupayakan pembentukan karakter yang baik (*good character*). Berikutnya, ribuan tahun setelah itu, rumusan tujuan utama pendidikan tetap pada wilayah serupa, yakni pembentukan kepribadian manusia yang baik. Tokoh pendidikan Barat yang mendunia seperti Klipatrick, Lickona, Brooks dan Goble seakan menggemakan kembali gaung yang disuarakan Socrates dan Nabi Muhammad Saw, bahwa moral, akhlak atau karakter adalah tujuan yang tidak terhindarkan dari dunia pendidikan. Begitu juga dengan Marthin Luther King Jr. menyetujui pemikiran tersebut dengan mengatakan, "*Intelligence plus character, that is the true aim of education*". Kecerdasan plus karakter, itulah tujuan yang benar dari pendidikan. Pakar pendidikan Indonesia, Fuad Hasan, dengan tesis pendidikan adalah pembudayaan, juga ingin menyampaikan hal yang sama dengan tokoh-tokoh pendidikan di atas. Menurutnya, pendidikan bermuara pada pengalihan nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial (*transmission of cultural values and social norms*).

Pandangan tokoh-tokoh di atas, sesungguhnya ingin menunjukkan bahwa pendidikan sebagai nilai universal kehidupan, memiliki tujuan pokok yang disepakati di setiap jaman, pada setiap kawasan, dan dalam semua pemikiran. Dengan bahasa sederhana, tujuan yang disepakati itu adalah merubah manusia menjadi lebih baik dalam pengetahuan, sikap dan keterampilan. Bila pendidikan memiliki tujuan yang sangat mulia itu, lalu bagaimana dengan implementasi dan realitas yang terjadi? Sudah sejalankah usaha-usaha pendidikan yang terjadi selama ini dengan tujuan

mulianya? Inilah yang mengusik banyak para pakar kelas dunia, sehingga bermunculan lah berbagai tawaran pendidikan alternatif. Hal yang paling menggelisahkan dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul adalah kenyataan bahwa kompetensi yang ditampilkan para siswa sebagai *output* pendidikan sangat kontradiktif dengan tujuan pendidikan.

Karakter bangsa merupakan aspek penting dari kualitas SDM karena turut menentukan kemajuan suatu bangsa. Karakter yang berkualitas perlu dibentuk dan dibina sejak usia dini. Karakter adalah kumpulan tata nilai yang menuju pada suatu sistem, yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku yang ditampilkan. Sedangkan Doni Koesoema A⁵⁰ memahami bahwa karakter sama dengan kepribadian. Kepribadian dianggap sebagai ciri, karakteristik, atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan. Sementara Winnie memahami bahwa istilah karakter memiliki dua pengertian tentang karakter. Pertama, ia menunjukkan bagaimana seseorang bertingkah laku. Apabila seseorang berperilaku tidak jujur, kejam, atau rakus, tentulah orang tersebut memanifestasikan perilaku buruk. Sebaliknya, apabila seseorang berperilaku jujur, suka menolong, tentulah orang tersebut memanifestasikan karakter mulia. Kedua, istilah karakter erat kaitannya dengan *personality*. Seseorang baru bisa disebut orang yang berkarakter (*a person of character*) apabila tingkah lakunya sesuai kaidah moral.

Sedangkan Imam Ghazali menganggap bahwa karakter lebih dekat dengan akhlaq, yaitu spontanitas manusia dalam bersikap, atau melakukan perbuatan yang telah menyatu dalam diri manusia sehingga ketika muncul tidak perlu dipikirkan lagi.

Dari pendapat di atas difahami bahwa karakter itu berkaitan dengan kekuatan moral, berkonotasi positif, bukan netral. Jadi, orang berkarakter adalah orang yang mempunyai kualitas moral positif. Dengan demikian, pendidikan membangun karakter, secara implisit mengandung arti membangun sifat atau pola perilaku yang didasari atau berkaitan dengan dimensi moral yang positif atau baik, bukan yang negatif atau buruk. Hal ini didukung oleh Peterson dan Seligman (Gedhe Raka, 2007:5) yang mengaitkan secara langsung 'character strength' dengan kebajikan. Character strength dipandang sebagai unsur-unsur psikologis yang membangun kebajikan (*virtues*). Salah satu kriteria utama dari 'character strength' adalah bahwa karakter tersebut berkontribusi besar dalam mewujudkan sepenuhnya potensi dan cita-cita seseorang dalam membangun kehidupan yang baik, yang bermanfaat bagi dirinya, orang lain, dan bangsanya

Pendidikan adalah proses internalisasi budaya ke dalam diri seseorang dan masyarakat sehingga membuat orang dan masyarakat jadi beradab. Pendidikan bukan merupakan sarana transfer ilmu pengetahuan saja, tetapi lebih luas lagi yakni sebagai sarana pembudayaan dan penyaluran nilai (*enkulturisasi* dan *sosialisasi*). Anak harus mendapatkan pendidikan yang menyentuh dimensi dasar kemanusiaan. Dimensi kemanusiaan itu mencakup sekurang-kurangnya tiga hal paling mendasar, yaitu: (1) Kognitif, yang tercermin pada kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk menggali dan mengembangkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; (2) afektif, yang tercermin pada kualitas keimanan, ketakwaan, akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur serta kepribadian unggul, dan kompetensi estetis; dan (3) Psikomotorik yang tercermin pada kemampuan mengembangkan keterampilan teknis, kecakapan praktis, dan kompetensi *kinestetis*.

Selain memperkecil resiko kehancuran, karakter juga menjadi modal yang sangat penting untuk bersaing dan bekerja sama secara tangguh dan terhormat di tengah-tengah bangsa lain. Karakterlah yang membuat bangsa Jepang cepat bangkit sesudah kekalahannya dalam Perang Dunia II dan meraih kembali martabatnya di dunia internasional. Karakterlah yang membuat

⁵⁰ Doni Koesoema, A., *Pendidikan Karakter*, (Sumber: Kompas Cyber, 2010).

bangsa Vietnam tidak bisa ditaklukkan, bahkan mengalahkan dua bangsa yang secara teknologi dan ekonomi jauh lebih maju, yaitu Perancis dan Amerika.

Pembangunan karakterlah yang membuat Korea Selatan sekarang jauh lebih maju dari Indonesia, walaupun pada tahun 1962 keadaan kedua negara secara ekonomi dan teknologi hampir sama. Pembangunan karakterlah yang membuat para pejuang kemerdekaan berhasil menghantar bangsa Indonesia ke gerbang kemerdekaannya (Gedhe Raka, 1997). Selama dimensi karakter tidak menjadi bagian dari kriteria keberhasilan dalam pendidikan, selama itu pula pendidikan tidak akan berkontribusi banyak dalam pembangunan karakter. Dalam kenyataannya, pendidik berkarakterlah yang menghasilkan SDM handal dan memiliki jati diri. Oleh karena itu, jadilah manusia yang memiliki jati diri, berkarakter kuat dan cerdas.

Adapun pilar akhlak yang harus dimiliki dalam diri seseorang, sehingga ia menjadi orang yang berkarakter baik (*good character*), memiliki sikap jujur, sabar, rendah hati, tanggung jawab dan rasa hormat, yang tercermin dalam kesatuan organisasi pribadi yang harmonis dan dinamis. Tanpa nilai-nilai moral dasar (*basic moral values*) yang senantiasa mengejewantah dalam diri pribadi, kapan dan dimana saja, orang dapat dipertanyakan kadar keimanan dan ketaqwaan.

2.6 Pendidikan Karakter sebagai Prioritas Pendidikan

Tidak dapat dipungkiri, sekolah memiliki pengaruh dan dampak terhadap karakter siswa, baik disengaja maupun tidak. Kenyataan ini menjadi *entry point* untuk menyatakan bahwa sekolah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pendidikan moral dan pembentukan karakter. Selanjutnya para pakar pendidikan terutama pendidikan nilai, moral atau karakter, melihat hal itu bukan sekedar tugas dan tanggung jawab tetapi juga merupakan suatu usaha yang harus menjadi prioritas. Sudarminta misalnya, mencatat tidak kurang dari tiga alasan pentingnya pendidikan moral di sekolah; 1) bagi siswa sekolah dasar dan menengah, sekolah adalah tempat dalam proses pembiasaan diri, mengenal dan mematuhi aturan bersama dan proses pembentukan identitas diri, 2) sekolah adalah tempat sosialisasi ke dua setelah keluarga. Di tempat ini para siswa dirangsang pertumbuhan moralnya karena berhadapan dengan cara bernalar dan bertindak moral yang mungkin berbeda dengan apa yang selama ini dipelajari dari keluarga, 3) pendidikan di sekolah merupakan proses pembudayaan subyek didik. Maka sebagai proses pembudayaan seharusnya memuat pendidikan moral.

Sementara itu, Berkowitz dan Melinda menambahkan 3 alasan mendasar lainnya. 1) Secara faktual, disadari atau tidak, disengaja atau tidak, sekolah berpengaruh terhadap karakter siswa. 2) Secara politis, setiap negara mengharapkan warga negara yang memiliki karakter positif. Banyak hal yang berkaitan dengan kesuksesan pembangunan sebuah negara sangat bergantung pada karakter bangsanya. Demokrasi yang diperjuangkan di banyak negara, sukses dan gagalnya juga tergantung pada karakter warga negara. Di sinilah, sekolah harus berkontribusi terhadap pembentukan karakter agar bangsanya tetap survive. 3) Perkembangan mutakhir ternyata menunjukkan bahwa pendidikan karakter yang efektif mampu mendorong dan meningkatkan pencapaian tujuan-tujuan akademik sekolah. Dengan kata lain, pendidikan karakter juga dapat meningkatkan pembelajaran. Dapat ditambahkan di sini, bahwa fenomena pengasuhan dalam keluarga (*parenting*) sekarang ini banyak yang sudah menyalahi peran utama keluarga sebagai media sosialisasi utama yang mengenalkan nilai-nilai dan norma-norma kehidupan kepada anak. Bermunculannya tempat penitipan anak (*child care*) misalnya, menunjukkan banyak keluarga yang sudah kehilangan waktu untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya.

Argumen tajam lainnya disampaikan oleh Robert W. Howard. Menurutnya, sekalipun perdebatan seputar tujuan pendidikan tidak pernah berakhir, namun upaya mempersiapkan generasi baru dari warga negara merupakan suatu tujuan yang telah disepakati. Kewarganegaraan ini mempunyai dua dimensi politik dan sosial, yang keduanya menyatu dan terlibat dengan isu-isu moral. Tidaklah mungkin meninggalkan isu-isu moral ini di luar jangkauan sekolah. Sebagai konsekuensinya, pendidikan moral haruslah menjadi salah satu dari dua tujuan umum pendidikan; yang tujuan lainnya adalah mengajarkan kecerdasan dan kecakapan akademik (*teaching academic content and skills*).

Argumen-argumen di atas dengan jelas menunjukkan bahwa sekolah tidak dapat menghindari dari pendidikan karakter. Sekolah pun tidak dapat mengupayakan dan menerapkannya dengan tanpa kesungguhan. Sekolah harus menyikapi pendidikan karakter seserius sekolah menghadapi pendidikan akademik, karena sekolah yang hanya mendidik pemikiran tanpa mendidik moral adalah sekolah yang sedang mempersiapkan masyarakat yang berbahaya. Kesimpulan serupa juga ditegaskan dalam Sister Mary Janet dan Ralph G. Chamberlin. Menurutnya, sekolah memiliki yang sangat signifikan dalam mengajarkan moral dan nilai-nilai agama.

2.7 Pendidikan Karakter dalam Dunia Pendidikan Islam

Karakter berasal dari nilai tentang sesuatu, suatu nilai yang diwujudkan dalam bentuk perilaku anak itulah yang disebut karakter. Jadi suatu karakter melekat dengan nilai dari perilaku tersebut karenanya tidak ada perilaku anak yang tidak bebas dari nilai.

Dalam referensi Islam, nilai yang sangat terkenal dan melekat yang mencerminkan akhlak dan perilaku yang luar biasa yang tercermin pada diri baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu: 1) sidik, 2) Tabligh, 3) amanah, 4) Fathonah. Tentu dapat dipahami bahwa empat nilai ini merupakan esensi, bukan seluruhnya. Karena Nabi Muhammad SAW terkenal dengan karakter kesabarannya, ketangguhannya, dan berbagai karakter lainnya.

Sidik yang berarti benar, mencerminkan bahwa Rasulullah berkomitmen pada kebenaran, selalu berkata dan berbuat benar, dan berjuang untuk menegakkan kebenaran. Amanah yang berarti jujur/terpercaya, mencerminkan bahwa apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan Rasulullah dapat dipercaya oleh siapapun, baik oleh kaum muslimin maupun non muslim. Fathonah yang berarti cerdas / pandai, arif, luas wawasan, terampil dan profesional. Artinya, perilaku Rasulullah dapat dipertanggung jawabkan keahliannya dalam memecahkan masalah. Tabligh yang bermakna komunikatif mencerminkan bahwa siapapun yang menjadi lawan bicara Rasulullah, maka orang tersebut akan mudah memahami apa yang dibicarakan atau dimaksudkan oleh Rasulullah.

Dalam jurnal internasional, *The Journal of Moral Education*, nilai-nilai dalam ajaran Islam pernah diangkat sebagai *hot issue* yang dikupas secara khusus dalam volume 36 tahun 2007. Dalam diskursus pendidikan karakter ini memberikan pesan bahwa spiritualitas dan nilai-nilai agama tidak bisa dipisahkan dari pendidikan karakter. Moral dan nilai-nilai spiritual sangat fundamental dalam membangun kesejahteraan dalam organisasi sosial mana pun. Tanpa keduanya, maka elemen vital yang mengikat kehidupan masyarakat dapat dipastikan lenyap.

Dalam Islam, tidak ada disiplin ilmu yang terpisah dari etika-etika Islam. Dan pentingnya komparasi antara akal dan wahyu dalam menentukan nilai-nilai moral terbuka untuk

diperdebatkan. Bagi kebanyakan muslim segala yang dianggap halal dan haram dalam Islam, dipahami sebagai keputusan Allah tentang benar dan baik. Dalam Islam terdapat tiga nilai utama, yaitu *akhlak*, *adab*, dan *keteladanan*. Akhlak merujuk kepada tugas dan tanggung jawab selain syari'ah dan ajaran Islam secara umum. Sedangkan term *adab* merujuk kepada sikap yang dihubungkan dengan tingkah laku yang baik. Dan *keteladanan* merujuk kepada kualitas karakter yang ditampilkan oleh seorang muslim yang baik yang mengikuti keteladanan Nabi Muhammad saw. Ketiga nilai inilah yang menjadi pilar pendidikan karakter dalam Islam.

Sebagai usaha yang identik dengan ajaran agama, pendidikan karakter dalam Islam memiliki keunikan dan perbedaan dengan pendidikan karakter di dunia Barat. Perbedaan-perbedaan tersebut mencakup penekanan terhadap prinsip-prinsip agama yang abadi, aturan dan hukum dalam memperkuat moralitas, perbedaan pemahaman tentang kebenaran, penolakan terhadap otonomi moral sebagai tujuan pendidikan moral, dan penekanan pahala di akhirat sebagai motivasi perilaku bermoral. Inti dari perbedaan-perbedaan ini adalah keberadaan wahyu ilahi sebagai sumber dan rambu-rambu pendidikan karakter dalam Islam. Akibatnya, pendidikan karakter dalam Islam lebih sering dilakukan secara doktriner dan dogmatis, tidak secara demokratis dan logis. Pendekatan semacam ini membuat pendidikan karakter dalam Islam lebih cenderung pada *teaching right and wrong*. Atas kelemahan ini, pakar-pakar pendidikan Islam kontemporer seperti Muhammad Iqbal, Sayyed Hosen Nasr, Naquib Al-Attas dan Wan Daud, menawarkan pendekatan yang memungkinkan pembicaraan yang menghargai bagaimana pendidikan moral dinilai, dipahami secara berbeda, dan membangkitkan pertanyaan mengenai penerapan model pendidikan moral Barat.

Hal penting yang dapat disimpulkan dari paparan di atas adalah kekayaan pendidikan Islam dengan ajaran moral yang sangat menarik untuk dijadikan *content* dari pendidikan karakter. Namun demikian pada tataran operasional, pendidikan Islam belum mampu mengolah *content* ini menjadi materi yang menarik dengan metode dan teknik yang efektif.

2.8 Faktor-faktor Keberhasilan Pendidikan Karakter

Sesungguhnya, bahwa pendidikan karakter bergerak dari *knowing* menuju *doing* atau *acting*. William Kilpatrick menyebutkan salah satu penyebab ketidakmampuan seseorang berlaku baik meskipun ia telah memiliki pengetahuan tentang kebaikan itu (*moral knowing*) adalah karena ia tidak terlatih untuk melakukan kebaikan (*moral doing*). Berangkat dari pemikiran ini maka kesuksesan pendidikan karakter sangat bergantung pada ada tidaknya *knowing*, *loving*, dan *doing* atau *acting* dalam penyelenggaraan pendidikan karakter.

Moral Knowing sebagai faktor pertama memiliki enam unsur, yaitu kesadaran moral (*moral awareness*), pengetahuan tentang nilai-nilai moral (*knowing moral values*), penentuan sudut pandang (*perspective taking*), logika moral (*moral reasoning*), keberanian mengambil menentukan sikap (*decision making*), dan pengenalan diri (*self knowledge*). Keenam unsur adalah komponen-komponen yang harus diajarkan kepada siswa untuk mengisi ranah kognitif mereka.

Selanjutnya *Moral Loving* atau *Moral Feeling* merupakan penguatan aspek emosi siswa untuk menjadi manusia berkarakter. Penguatan ini berkaitan dengan bentuk-bentuk sikap yang harus dirasakan oleh siswa, yaitu kesadaran akan jati diri, percaya diri (*self esteem*), kepekaan terhadap derita orang lain (*emphaty*), cinta kebenaran (*loving the good*), pengendalian diri (*self control*), kerendahan hati (*humility*).

Setelah dua faktor tadi terwujud, maka *Moral Acting* sebagai *outcome* akan dengan mudah muncul dari para siswa. Namun, merujuk kepada tesis Ratna Megawangi bahwa karakter adalah tabiat yang langsung disetir dari otak, maka ketiga tahapan tadi perlu disuguhkan kepada siswa melalui cara-cara yang logis, rasional dan demokratis. Sehingga perilaku yang muncul benar-benar sebuah karakter bukan topeng. Berkaitan dengan hal ini, perkembangan pendidikan karakter di Amerika Serikat telah sampai pada ikhtiar ini. Dalam sebuah situs nasional karakter pendidikan di Amerika bahkan disiapkan *lesson plan* untuk tiap bentuk karakter yang telah dirumuskan dari mulai sekolah dasar sampai sekolah menengah.

Pendidikan karakter dinilai sukses bila anak telah menunjukkan kebiasaan berperilaku baik. Hal ini tentu saja memerlukan waktu, kesempatan, dan tuntunan yang berkelanjutan. Perilaku berkarakter tersebut akan muncul, berkembang dan menguat pada diri anak hanya bila mengetahui konsep dan ciri-ciri perilaku karakter, merasakan dan memiliki sikap yang positif pada konsep karakter yang baik dan terbiasa untuk melakukannya. Dengan demikian, pendidikan karakter harus ditanam melalui cara-cara yang masuk di akal, rasional dan demokratis.

Pendidikan karakter membutuhkan identifikasi, tanpa identifikasi, pendidikan karakter hanya akan menjadi sebuah perjalanan tanpa akhir, petualangan tanpa peta. Organisasi manapun di dunia ini yang menaruh perhatian besar terhadap pendidikan karakter harus mampu mengidentifikasi karakter-karakter dasar yang akan menjadi pilar perilaku individu. *Indonesia Heritage Foundation* merumuskan sembilan karakter dasar yang menjadi tujuan pendidikan karakter. Kesembilan karakter tersebut adalah; (1) cinta kepada Allah dan semesta beserta isinya, (2) tanggung jawab, disiplin dan mandiri, (3) jujur, (4) hormat dan santun, (5) kasih sayang, peduli, dan kerja sama, (6) percaya diri, kreatif, kerja keras dan pantang menyerah, (7) keadilan dan kepemimpinan, baik dan rendah hati, dan (9) toleransi, cinta damai dan persatuan

Sementara Character Counts di Amerika mengidentifikasikan bahwa karakter-karakter yang menjadi dasar, adalah; (1) dapat dipercaya (*trustworthiness*), (2) rasa hormat dan perhatian (*respect*), (3) tanggung jawab (*responsibility*), (4) jujur (*fairness*), (5) peduli (*caring*), (6) kewarganegaraan (*citizenship*), (7) ketulusan (*honesty*), berani (*courage*), (9) tekun (*diligence*), dan (10) integritas.

Kemudian Ari Ginanjar Agustian dengan teori ESQ menyodorkan pemikiran bahwa setiap karakter positif sesungguhnya akan merujuk kepada sifat-sifat mulia Allah, yaitu *al-Asmâ al-Husnâ*. Sifat-sifat dan nama-nama mulia Tuhan inilah sumber inspirasi setiap karakter positif yang dirumuskan oleh siapapun. Dari sekian banyak karakter yang bisa diteladani dari nama-nama Allah itu, Ari merangkumnya dalam 7 karakter dasar, yaitu jujur, tanggung jawab, disiplin, visioner, adil, peduli, dan kerja sama.⁵¹

Dalam konteks pendidikan karakter, dapat dilihat bahwa kemampuan yang harus dikembangkan pada peserta didik melalui lembaga pendidikan adalah berbagai kemampuan yang akan menjadikan manusia sebagai makhluk yang berketuhanan (tunduk patuh pada konsep ketuhanan) dan mengemban amanah sebagai pemimpin di dunia. Kemampuan yang perlu dikembangkan pada peserta didik Indonesia adalah kemampuan mengabdikan pada Tuhan yang menciptakannya, kemampuan untuk menjadi dirinya sendiri, kemampuan untuk hidup secara harmoni dengan

⁵¹ Lihat Ary Ginanjar Agustian, *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual*, (Jakarta: Arga, 2007), hlm. 106

manusia dan makhluk lainnya, dan kemampuan untuk menjadikan dunia ini sebagai wahana kemakmuran dan kesejahteraan bersama.

Ukuran keberhasilan pendidikan seyogianya tidak berhenti pada angka ujian, seperti halnya ujian Nasional, karena kalau demikian, pembelajaran akan menjadi proses menguasai keterampilan dan mengakumulasi pengetahuan semata. Paradigma ini akan menempatkan peserta didik sebagai pelajar imitatif dan belajar dari ekspose-ekspose didaktis yang akan berhenti pada penguasaan fakta, prinsip dan aplikasinya. Paradigma ini tentunya tidak sesuai dengan esensi pendidikan yang digariskan dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003.

Sebelum mengkaji tentang tujuan pendidikan karakter pada suatu lembaga pendidikan, perlu merenungan pertanyaan berikut: Apakah tujuan pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam UUSPN No 20 Tahun 2003 berkesesuaian dengan pendidikan karakter?

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Mencermati fungsi pendidikan nasional, yakni mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa seharusnya memberikan pencerahan yang memadai bahwa pendidikan harus berdampak pada watak manusia/ bangsa Indonesia.

Fungsi kedua, “membentuk watak” mengandung makna bahwa pendidikan nasional harus diarahkan pada pembentukan watak. Pendidikan yang berorientasi pada watak peserta didik merupakan suatu hal yang sangat tepat, tetapi perlu diperjelas mengenai istilah perlakuan terhadap “watak”. Apakah watak itu harus “dikebangkan”, “dibentuk”, atau “difasilitasi”. Perspektif paedagogik, lebih memandang bahwa pendidikan itu mengembangkan/ menguatkan/ memfasilitasi watak, bukan membentuk watak.

Fungsi ketiga “peradaban bangsa”. Dalam spektrum pendidikan nasional dapat dipahami bahwa pendidikan selalu dikaitkan dengan pembangunan bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa. Dalam perspektif paedagogik, pendidikan itu berfungsi untuk menjadikan manusia yang terdidik dengan kata lain bangsa yang beradab merupakan dampak dari pendidikan yang menghasilkan manusia terdidik.

Adapun tujuan pendidikan karakter di lembaga pendidikan adalah: (1) Menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang dianggap penting dan perlu sehingga menjadi kepribadian/ kepemilikan peserta didik yang khas sebagaimana nilai-nilai yang dikembangkan, (2) Mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak berkesesuaian dengan nilai-nilai yang dikembangkan sekolah, (3) Membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan masyarakat dalam memerankan tanggung jawab pendidikan berkarakter secara bersama-sama.⁵²

Ketiga tujuan dalam pendidikan karakter seting sekolah adalah membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan masyarakat dalam memerankan tanggung jawab pendidikan karakter secara bersama. Tujuan ini memiliki makna bahwa proses pendidikan karakter disekolah

⁵² Dharma Kesuma, dkk., Pendidikan Karakter: Kajian Teori dan Praktik di Sekolah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 9.

harus dihubungkan dengan proses pendidikan dikeluarga. Jika saja pendidikan karakter disekolah hanya bertumpu pada interaksi peserta didik dengan guru dikelas dan disekolah maka pencapaian berbagai karakter yang diharapkan akan sulit diwujudkan. Mengapa demikian? Karena penguatan perilaku merupakan suatu hal yang menyeluruh atau holistik, bukan suatu gambaran dari rentang waktu yang dimiliki anak. Dalam setiap menit dan detik, interaksi anak dengan lingkungannya dapat dipastikan akan terjadi proses mempengaruhi perilaku anak. Pertanyaannya, apakah proses yang dialami oleh anak menguatkan atau bahkan melemahkan karakter yang dibangun oleh sekolah?

Ada beberapa faktor yang berpengaruh pada pembentukan karakter yang meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan masyarakat. Lingkungan keluarga merupakan faktor utama dan pertama dalam pembentukan sikap perilaku dan kepribadian atau karakter anak. Keluarga bertanggung jawab pada pembentukan kepribadian, agama, dan kasih sayang agar tidak terjerumus pada sikap dan perilaku yang menyimpang. Lingkungan sekolah adalah tempat menuntut ilmu. Pada saat siswa berada disekolah maka guru yang bertanggung jawab mendidik, membina, dan memberi contoh atau teladan yang baik kepada para siswa, tidak hanya mengembangkan kemampuan akademik namun juga bertanggung jawab membangun karakter siswa.

Dalam membangun karakter siswa, harus dilakukan secara menyeluruh oleh semua guru pada semua mata pelajaran. Guru dapat membangun karakter siswa melalui materi maupun metode pembelajaran yang diterapkan. Misalnya, diskusi kelompok, melakukan percobaan secara berkelompok, maka di samping mengembangkan penguasaan atau pemahaman teori kepada siswa juga dapat dikembangkan keterampilan psikomotor. Selain itu juga, dapat berkembang aspek sikap, misalnya disiplin dalam bekerja, bertanggung jawab menyelesaikan tugas, bekerja sama dengan teman, mau menerima pendapat teman atau tenggang rasa, jujur, cermat, tidak mudah putus asa, dan sikap yang lainnya.

Pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan ciri masing-masing mata pelajaran dan menekankan pada proses atau siswa aktif, maka pembelajaran akan menarik, bermakna bagi siswa sehingga dapat mengembangkan sikap dan perilaku positif bagi siswa. Lingkungan masyarakat berpengaruh pada pembentukan karakter siswa. Siswa yang berada pada lingkungan masyarakatnya baik, maka akan bersikap dan berperilaku baik, dan sebaliknya apabila berada pada lingkungan yang kurang baik juga akan bersikap dan berperilaku kurang baik.

Lembaga pendidikan dalam membangun karakter harus menjalankan pendekatan pendidikan nilai yang komprehensif, antara lain meliputi: (1) Bertindak sebagai pengasuh teladan dan pembimbing yang memperlakukan siswa dengan cinta kasih, memberi teladan yang baik, mendukung perilaku pro sosial dan mengoreksi perilaku yang kurang tepat/ menyimpang; (2) Menciptakan komunitas moral di kelas, membantu siswa di kelas untuk saling mengenal, peduli dan saling menghormati; (3) Mepraktikkan disiplin moral, menegakkan peraturan dan menjadikan peraturan tersebut sebagai kontrol diri; (4) Menciptakan lingkungan kelas yang demokratis, melibatkan siswa dalam diskusi dan pengambilan keputusan, ikut bertanggung jawab bahwa sekolah sebagai tempat untuk belajar; (5) Mengajarkan nilai melalui kurikulum, menggunakan mata pelajaran sebagai sarana untuk mengkaji masalah etika; (6) Menggunakan pembelajaran kooperatif, untuk mengajarkan

sikap dan keterampilan tolong menolong dan kerja sama dengan temannya, tanggung jawab terhadap dirinya maupun kelompok, dan dapat bekerja sama dengan baik.⁵³

2.9 Strategi dan Desain Pendidikan Karakter

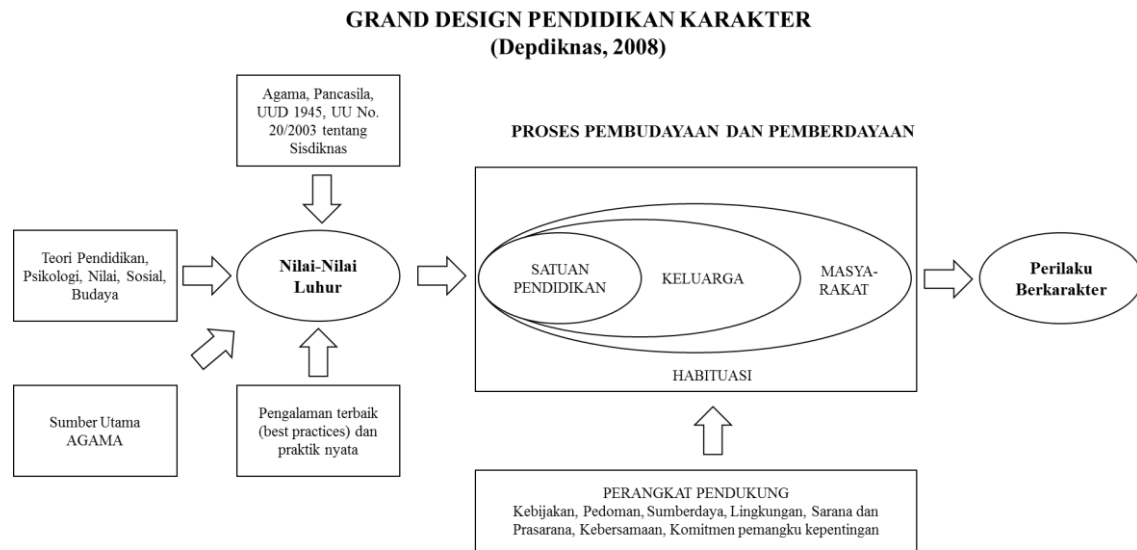
Dalam Grand Design Pendidikan Karakter Kemendiknas⁵⁴ dinyatakan bahwa pendidikan karakter merupakan proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik agar memiliki nilai-nilai luhur dan perilaku berkarakter yang dilakukan melalui tri pusat pendidikan, yaitu: pendidikan di keluarga, pendidikan di sekolah dan pendidikan dimasyarakat. Demikian pula, pada model pendidikan karakter yang dikemukakan oleh Westwood⁵⁵ di atas, juga menetapkan bahwa pendidikan karakter mencakup nilai-nilai luhur yang berlaku secara universal, yang seharusnya mulai dibangun dalam lingkungan keluarga (*home*), yang dikembangkan di lembaga pendidikan sekolah (*school*), untuk diterapkan secara nyata di dalam kehidupan bermasyarakat (*community*), dan juga harus tercermin dalam kegiatan di dunia usaha atau dunia kerja (*business*).

Pada masing-masing pusat pendidikan tersebut harus terjadi sinergi, dan tidak boleh salingkontradiksi yang membuat upaya pendidikan karakter menjadi tidak efektif dan kontraproduktif. Pengembangan budaya dan karakter bangsa pada prinsipnya tidak berbentuk sebagai pokok bahasan, tetapi terintegrasi ke dalam setiap mata pelajaran, program pengembangan diri melalui kegiatan ekstra kurikuler, dan budaya sekolah dalam bentuk pembiasaan. Seperti tergambar pada diagram di bawah ini:

⁵³ Lih. Thomas Lickona, dalam Pratiwi Pujiastuti, 2013, *Pendidikan Untuk Pencerahan dan Kemandirian Bangsa*, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 2013), hal. 280.

⁵⁴ Tim Pendidikan Karakter Kemendiknas, *Grand Design Pendidikan Karakter*, (Jakarta: Kemendiknas, 2010).

⁵⁵ Lih. Media Suparlan, *Pendidikan Karakter dan Kecerdasan Ganda*, 2010, <http://www.suparlan.com>.



Gambar 1.
Grand Design Pendidikan Karakter

Dalam pengembangan karakter peserta didik di sekolah, guru memiliki posisi yang strategis sebagai pelaku utama. Guru merupakan sosok yang bisa digugu dan ditiru atau menjadi idola bagi peserta didik. Guru bisa menjadi sumber inspirasi dan motivasi peserta didiknya. Sikap dan perilaku seorang guru sangat membekas dalam diri siswa, sehingga ucapan, karakter dan kepribadian guru menjadi cermin siswa. Dengan demikian guru memiliki tanggung jawab besar dalam menghasilkan generasi yang berakarakter, berbudaya, dan bermoral. Tugas-tugas manusiawi itu merupakan transformasi, identifikasi, dan pengertian tentang diri sendiri, yang harus dilaksanakan secara bersama-sama dalam kesatuan yang organis, harmonis, dan dinamis.

Ada beberapa strategi yang dapat memberikan peluang dan kesempatan bagi guru untuk memainkan peranannya secara optimal dalam hal pengembangan pendidikan karakter peserta didik di sekolah, sebagai berikut:

1. Optimalisasi peran guru dalam proses pembelajaran. Guru tidak seharusnya menempatkan diri sebagai aktor yang dilihat dan didengar oleh peserta didik, tetapi guru seyogyanya berperan sebagai sutradara yang mengarahkan, membimbing, memfasilitasi dalam proses pembelajaran, sehingga peserta didik dapat melakukan dan menemukan sendiri hasil belajarnya.
2. Integrasi materi pendidikan karakter ke dalam mata pelajaran. Guru dituntut untuk peduli, mau dan mampu mengaitkan konsep-konsep pendidikan karakter pada materi-materi pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampunya. Dalam hubungannya dengan ini, setiap guru dituntut untuk terus menambah wawasan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pendidikan karakter, yang dapat diintegrasikan dalam proses pembelajaran.
3. Mengoptimalkan kegiatan pembiasaan diri yang berwawasan pengembangan budi pekerti dan akhlak mulia. Para guru (pembina program) melalui program pembiasaan diri lebih mengedepankan atau menekankan kepada kegiatan-kegiatan pengembangan budi pekerti dan akhlak mulia yang kontekstual, kegiatan yang menjurus pada pengembangan kemampuan afektif dan psikomotorik.

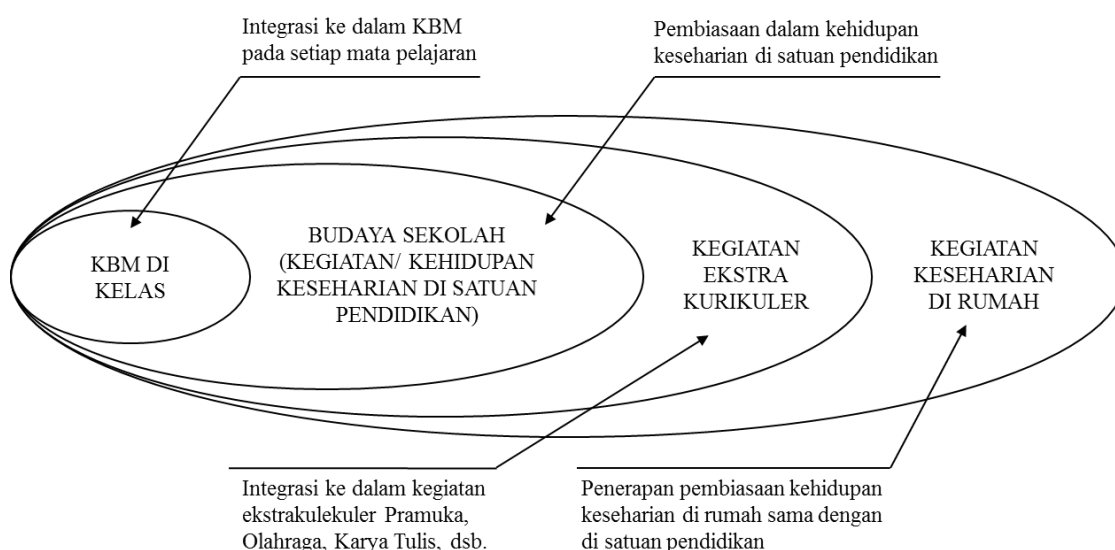
4. Penciptaan lingkungan sekolah yang kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya karakter peserta didik. Lingkungan terbukti sangat berperan penting dalam pembentukan pribadi manusia (peserta didik), baik lingkungan fisik maupun lingkungan spiritual. Untuk itu, sekolah dan guru perlu untuk menyiapkan fasilitas-fasilitas dan melaksanakan berbagai jenis kegiatan yang mendukung kegiatan pengembangan pendidikan karakter peserta didik.
5. Menjalin kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam pengembangan pendidikan karakter. Bentuk kerjasama yang bisa dilakukan adalah menempatkan orang tua peserta didik dan masyarakat sebagai fasilitator dan nara sumber dalam kegiatan-kegiatan pengembangan pendidikan karakter yang dilaksanakan di sekolah.
6. Menjadi figur teladan bagi peserta didik. Penerimaan peserta didik terhadap materi pembelajaran yang diberikan oleh seorang guru, sedikit tidak akan bergantung kepada penerimaan pribadi peserta didik tersebut terhadap pribadi seorang guru. Ini suatu hal yang sangat manusiawi, dimana seseorang akan selalu berusaha untuk meniru, mencontoh apa yang disenangi dari model atau figurnya tersebut. Momen seperti ini sebenarnya merupakan kesempatan bagi seorang guru, baik secara langsung maupun tidak langsung menanamkan nilai-nilai karakter dalam diri pribadi peserta didik. Dalam proses pembelajaran, integrasi nilai-nilai karakter tidak hanya dapat diintegrasikan ke dalam substansi atau materi pelajaran, tetapi juga pada prosesnya

Dalam uraian di atas menggambarkan peranan guru dalam pengembangan pendidikan karakter di sekolah yang berkedudukan sebagai katalisator atau teladan, inspirator, motivator, dinamisator, dan evaluator. Dalam berperan sebagai katalisator, maka keteladanan seorang guru merupakan faktor mutlak dalam pengembangan pendidikan karakter peserta didik yang efektif, karena kedudukannya sebagai figur atau idola yang digugu dan ditiru oleh peserta didik. Peran sebagai inspirator berarti seorang guru harus mampu membangkitkan semangat peserta didik untuk maju mengembangkan potensinya. Peran sebagai motivator, mengandung makna bahwa setiap guru harus mampu membangkitkan spirit, etos kerja dan potensi yang luar biasa pada diri peserta didik. Peran sebagai dinamisator, bermakna setiap guru memiliki kemampuan untuk mendorong peserta didik ke arah pencapaian tujuan dengan penuh kearifan, kesabaran, cekatan, cerdas dan menjunjung tinggi spiritualitas. Sedangkan peran guru sebagai evaluator, berarti setiap guru dituntut untuk mampu dan selalu mengevaluasi sikap atau perilaku diri, dan metode pembelajaran yang dipakai dalam pengembangan pendidikan karakter peserta didik, sehingga dapat diketahui tingkat efektivitas, efisiensi, dan produktivitas programnya.

Dengan demikian berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks sistem pendidikan di sekolah untuk mengembangkan pendidikan karakter peserta didik, guru harus diposisikan atau memposisikan diri pada hakekat yang sebenarnya, yaitu: a) guru merupakan pengajar dan pendidik, yang berarti disamping mentransfer ilmu pengetahuan, juga mendidik dan mengembangkan kepribadian peserta didik melalui intraksi yang dilakukannya di kelas dan luar kelas; b) guru hendaknya diberikan hak penuh (hak mutlak) dalam melakukan penilaian (evaluasi) proses pembelajaran, karena dalam masalah kepribadian atau karakter peserta didik, guru merupakan pihak yang paling mengetahui tentang kondisi dan perkembangannya; dan c) guru hendaknya mengembangkan sistem evaluasi yang lebih menitikberatkan pada aspek afektif, dengan menggunakan alat dan bentuk penilaian *essay* dan wawancara langsung dengan peserta didik. Alat dan bentuk penilaian seperti itu, lebih dapat mengukur karakteristik setiap peserta didik, serta mampu mengukur sikap kejujuran, kemandirian, kemampuan berkomunikasi, struktur logika, dan lain sebagainya yang merupakan bagian dari proses pembentukan karakter positif. Ini akan terlaksana dengan lebih baik lagi apabila didukung oleh pemerintah selaku penentu kebijakan.

Pendidik dan sekolah perlu mengintegrasikan nilai-nilai yang akan dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa ke dalam kurikulum, Silabus dan Rencana Program Pembelajaran (RPP) yang sudah ada, menuangkan dalam program pengembangan diri, dan melatih serta membiasakan nilai-nilai kebajikan tersebut dalam tata pergaulan (budaya) sekolah. Secara visual, strategi pendidikan karakter di sekolah dilukiskan pada Gambar 2 sebagai berikut:

STRATEGI PENDIDIKAN KARAKTER DI SEKOLAH (Mukhlis, 2009)



Gambar 2.
Strategi Pengembangan Pendidikan Karakter di Sekolah

Dalam membangun karakter siswa ada upaya-upaya yang bisa dilakukan atau diimplementasikan diantaranya: (1) Pembenahan kurikulum pendidikan yang dapat memberikan kemampuan dan keterampilan dasar minimal, membangkitkan sikap kreatif, inovatif, demokratis, dan sikap mandiri, dan membangun karakter lainnya. (2) Mengimplmentasikan manajemen yang baik, dalam rangka memberikan otonomi pedagogis secara maksimal kepada guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran disekolah, sehingga akan meningkatkan kemampuan akademik maupun non akademik.

Pendidikan karakter di sekolah dilakukan melalui pendidikan nilai-nilai kebajikan yang menjadi nilai dasar budaya dan karakter bangsa. Adapun tujuan pendidikan karakter melalui pendidikan di sekolah adalah:

- Mengembangkan potensi *kalbu/* nurani/ afektif peserta didik sebagai manusia dan warganegara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa.
- Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius.
- Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa.

- d. Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan.
- e. Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan.

Prinsip pembelajaran yang digunakan dalam pengembangan karakter bangsa adalah dengan mengusahakan agar peserta didik mengenal dan menerima nilai-nilai budaya dan karakter bangsa sebagai milik mereka dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya melalui tahapan mengenal pilihan, menentukan pilihan, dan selanjutnya menjadikan suatu nilai sebagai keyakinan diri. Dengan prinsip ini, peserta didik belajar melalui proses berpikir, bersikap, dan berbuat. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter adalah berkelanjutan dan melalui semua mata pelajaran, program pengembangan diri melalui kegiatan ekstra kurikuler, dan budaya sekolah. Pada dasarnya, nilai-nilai luhur tersebut tidak diajarkan tetapi dikembangkan, dan proses pendidikan yang dijalani oleh peserta didik dilakukan secara aktif dan menyenangkan.

Sementara itu, strategi pendidikan karakter menurut Islam didasarkan pada pandangan manusia menurut Islam atau gambaran manusia menurut Al Qur'an, yaitu:⁵⁶

- a. Manusia merupakan makhluk ciptaan-Nya, yang diberikan amanah sebagai *khalifatullah* di muka bumi.
- b. Manusia dikaruniai kecerdasan dan pengetahuan, yang harus digunakan untuk berbakti kepada-Nya.
- c. Manusia dilahirkan sama, tanpa membedakan berdasarkan ras ataupun kelahirannya.
- d. Di dalam mengembangkan kemampuan manusia, Islam tidak memisahkan antara pendidikan budaya dan pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).
- e. Tujuan pendidikan menurut Islam adalah menghasilkan manusia yang beriman dan sekaligus berpengetahuan. Yang satu menopang yang lain, dan hubungan keduanya terintegrasi.
- f. Mempelajari pengetahuan dan teknologi bukan sekedar untuk menguasainya, tetapi harus diarahkan pada cita-cita spiritualnya, yaitu untuk mewujudkan sebanyak mungkin bagi kemaslahatan umat manusia.

2.10 Tantangan Strategi Pengembangan Pendidikan Karakter

Dengan mengacu pada taksonomi Bloom, maka pendidikan karakter pada dasarnya termasuk pendidikan pada ranah afektif. Sebagaimana nasib pendidikan afektif selama ini yang hanya berhenti pada retorika saja, maka pendidikan karakter ke depan juga akan menghadapi tantangan yang tidak ringan, baik tantangan yang bersifat internal maupun eksternal. Tantangan yang bersifat internal dapat berupa: orientasi pendidikan kita selama ini yang masih mengutamakan aspek keberhasilan yang bersifat kognitif, praksis pendidikan yang masih banyak mengacu filsafat rasionalisme yang memberikan peranan yang sangat penting kepada kemampuan akal budi (otak) manusia, kemampuan dan karakter guru yang belum mendukung, serta budaya dan kultur sekolah yang kurang mendukung. Sementara itu, tantangan yang bersifat eksternal antara lain meliputi: pengaruh globalisasi, perkembangan sosial masyarakat, dan pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

⁵⁶ Tilaar, H. A. R., *Perubahan Sosial dan Pendidikan. Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*, (Jakarta: Penerbit PT. Grasindo, 2002).

Alam semesta dan realitas akan dapat dipahami oleh manusia tanpa ketergantungan kepada pengamatan dan pengalaman empirik. Akal budi manusia merupakan sumber ilmu pengetahuan dan sumber nilai, termasuk nilai-nilai moral. Efisiensi, kegunaan, semuanya merupakan ukuran dari filsafat rasionalisme. Sumber pengetahuan adalah kemampuan akal yang secara deduktif tetapi konsekuen dan logis dapat menguasai segala sesuatu tanpa perlu pemikiran induktif berdasarkan pengalaman empirik. Pemikiran pendidikan yang sejalan dengan filsafat rasionalisme ini adalah mengembangkan akal manusia untuk menguasai dunia, penguasaan alam, bahkan tujuan kehidupannya. Rasionalisme pada akhirnya memproklamirkan bahwa Tuhan itu tidak ada. Selain itu, perkembangan praksis pendidikan di Indonesia, baik pada era orde lama dan orde baru, ternyata masih sangat mewarnai praksis pendidikan kita saat ini. Pada masa orde lama sesuai dengan perkembangan politik di tanah air, telah lahir orientasi pendidikan ke arah etatisme dan nasionalisme yang sempit. Di era tersebut pendidikan telah menjadi bagian dari politik praktis.

Filsafat pendidikan telah digantikan dengan ideologi pendidikan yang bersumber dari ideologi Negara. Dengan sendirinya, proses pendidikan merupakan proses indoktrinasi yang tidak memberikan tempat kepada kreativitas dan kebebasan berpikir manusia. Pada era orde baru pada hakikatnya masih melanjutkan orientasi pedagogik orde lama demi untuk pembangunan. Pendekatan pembangunan melahirkan orientasi *developmentalisme*, yaitu proses pendidikan yang diarahkan kepada percepatan pembangunan, tanpa melihat kepada fundamen-fundamen pendidikan yang hakiki. Orientasi pendidikan diarahkan pada pencapaian target dan bukan kepada pengembangan manusia itu sendiri atau *dehumanisasi*. Dengan orientasi *developmentalisme*, dan usaha pencapaian target-target, maka telah mengarahkan orientasi pendidikan yang dehumanisasi. Pada orde reformasi, masyarakat Indonesia masih berada pada masa transisi. Orientasi pendidikan pada era orde lama dan orde baru terasa masih tetap eksis.

Mengubah suatu sistem pendidikan yang berorientasi dehumanisasi, memerlukan waktu yang panjang. Berdasarkan perkembangan praksis pendidikan tersebut, maka menurut analisis Pilliang⁵⁷ profil manusia Indonesia saat ini telah mengalami proses dehumanisasi yang diakibatkan oleh orientasi pendidikan. Pada masa orde lama, telah menghasilkan “manusia ideologi”, orde baru telah menghasilkan “manusia-manusia mesin dan era reformasi telah menghasilkan “*selfish man*” atau “manusia-manusia komoditi” yang bersedia dibayar untuk demonstrasi, karnavalisme, retorika, pawai unjuk rasa, juga menjadikan manusia yang suka memisahkan diri, separatisme dan lain-lain. Oleh karena itu, manusia Indonesia perlu *direhumanisasi* karena telah kehilangan kemanusiaannya.

Dalam Grand Design pendidikan karakter di sekolah yang dikembangkan oleh Kemendiknas, dinyatakan bahwa pendidikan karakter merupakan proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik agar memiliki nilai-nilai luhur dan perilaku yang berkarakter, yang dapat dilakukan melalui: integrasi nilai-nilai luhur dalam pembelajaran, melalui program pengembangan diri dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, dan dimanifestasikan ke dalam tata pergaulan dan budaya sekolah. Ketiga jalur pendidikan nilai-nilai luhur tersebut tidak boleh saling kontradiksi, tetapi harus selaras dan saling memperkuat. Integrasi nilai-nilai luhur ke dalam kegiatan pembelajaran di kelas dan dalam program pengembangan diri melalui kegiatan ekstra kurikuler pada umumnya dapat direncanakan secara terprogram dan terukur hasilnya. Namun, implementasi

⁵⁷ Lih. Tilaar, H. A. R., *Perubahan Sosial dan Pendidikan. Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*, (Jakarta: Penerbit PT. Grasindo, 2002).

atau manifestasi nilai-nilai luhur dalam tata pergaulan dan kultur/ budaya sekolah pada umumnya sulit terukur hasilnya. Di lain pihak, budaya atau kultur sekolah bukanlah keadaan yang dapat diciptakan secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil kristalisasi nilai-nilai yang menjadi keyakinan dan milik bersama, yang menjadi pengikat kuat kebersamaan mereka sebagai warga suatu masyarakat sekolah (Deal dan Peterson, 1999). Sementara itu, pengertian lain tentang kultur sekolah diajukan oleh Schein (1992), bahwa kultur sekolah adalah suatu pola asumsi dasar hasil invensi, penemuan atau pengembangan oleh suatu kelompok tertentu pada saat ia belajar dan berhasil dalam mengatasi masalah-masalah serta dianggap valid, dan akhirnya diajarkan kepada warga baru sebagai cara-cara yang benar dalam memandang, memikirkan dan merasakan masalah-masalah tersebut.

Gelombang globalisasi bukan hanya mengubah tatanan kehidupan global, tetapi juga telah mengubah tatanan kehidupan pada tingkat mikro. Pengaruh globalisasi di dalam ikatan kehidupan sosial dapat bersifat positif, tetapi dapat pula bersifat negatif. Salah satu dampak negatif dari proses globalisasi adalah kemungkinan terjadinya *disintegrasi* sosial. Beberapa gejala transisi sosial akibat globalisasi antara lain adalah hilangnya tradisi. Dalam hal ini, bentuk-bentuk budaya global telah memasuki segala segi kehidupan sosial di tingkat mikro, sehingga dikhawatirkan bahwa nilai-nilai tradisi dan nilai-nilai moral yang hidup di masyarakat semakin lama semakin terkikis. Gelombang globalisasi yang ditunjang dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menghancurkan batas-batas waktu, dan mengubah tata pergaulan umat manusia. Bahkan, pengertian mengenai negara-bangsa mulai berubah. Di mana-mana lahirlah bentuk *nasionalisme* baru yang dikenal sebagai *etno-nasionalisme* atau bentuk negara *post nation state*.

Terdapat kecenderungan berkembangnya sentimen nasional yang beralih kepada sentimen primordial baik dalam bentuk budaya, ras, agama. Perkembangan yang baru ini tentunya memberikan pengaruh terhadap sistem pendidikan yang dikenal dewasa ini. Memang disadari *etno-nasionalisme* dapat menjurus kepada sentimen *sukuisme* yang eksklusif. Tentu ini berbahaya bagi persatuan nasional. Masyarakat dan bangsa Indonesia yang terdiri atas kelompok-kelompok etnis dari yang beranggota jutaan sampai kelompok kecil yang beranggotakan ratusan orang, semuanya mempunyai kebudayaan sendiri. Sementara itu, diakui bahwa banyak faktor mempengaruhi merosotnya nilai-nilai moralitas dalam tata kehidupan kolektif sebagai bangsa. Hal ini terjadi akibat perubahan sistem politik pasca reformasi yang menimbulkan euforia politik berlebihan, kebebasan berdemokrasi yang nyaris tanpa batas, sampai mengabaikan nilai-nilai etika. Selain itu, pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang membuat arus informasi begitu deras. Nyaris tak ada lagi filter untuk memilih dan memilah. Norma-norma agama atau budaya nyaris tak mampu membendung informasi yang mendorong terjadinya degradasi moral. Apalagi norma hukum dan peraturan perundang-undangan mudah dibongkar-pasang, *didekonstruksi* dan *direkonstruksi* sesuai dengan kepentingan tertentu.

3 Penutup

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa: *Pertama*, pendidikan nilai-nilai luhur (karakter) melalui jalur pendidikan formal dipandang akan lebih efektif dibanding melalui jalur lainnya, seperti: pendidikan informal di keluarga, dan di masyarakat. Hal ini karena pendidikan karakter melalui jalur pendidikan formal akan lebih terprogram dan hasilnya akan terukur. *Kedua*, Strategi pendidikan budaya dan karakter bangsa melalui jalur pendidikan formal di sekolah terintegrasi ke dalam setiap mata pelajaran, program pengembangan diri melalui kegiatan ekstra kurikuler, dan budaya sekolah dalam bentuk pembiasaan. Pendidik dan sekolah perlu mengintegrasikan nilai-nilai yang akan dikembangkan dalam pendidikan budaya dan

karakter bangsa ke dalam kurikulum, Silabus dan Rencana Program Pembelajaran (RPP) yang sudah ada, menuangkan dalam program pengembangan diri dan melatih, serta membiasakan nilai-nilai kebajikan tersebut dalam tata pergaulan (budaya) sekolah. *Ketiga*, pendidikan karakter melalui jalur pendidikan di sekolah akan menghadapi tantangan yang tidak ringan. Tantangan yang bersifat internal dapat berupa: orientasi pendidikan yang masih mengutamakan keberhasilan pada aspek kognitif, praksis pendidikan yang masih banyak mengacu filsafat *rasionalisme* yang memberikan peranan yang sangat penting kepada kemampuan akal budi (otak) manusia, kemampuan dan karakter guru yang belum mendukung, serta budaya dan kultur sekolah yang kurang mendukung. Sementara itu, tantangan yang bersifat eksternal antara lain meliputi: pengaruh globalisasi, perkembangan sosial masyarakat, dan pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang telah mengubah tatanan kehidupan sosial masyarakat.

Daftar Pustaka

- Al-Jumbulati, Ali, 1994, *Perbandingan Pendidikan Islam*, terjemahan HM. Arifin, Jakarta: Reneka Cipta.
- Al-Nadwi, Abul Hasan, 1987, *Pendidikan Islam yang Mandiri*, alih bahasa Afif Muhammad, Cet. I, Bandung: Dunia Ilmu.
- Al Djamali, Fadhil, 1992, *Menerobos Krisis Pendidikan Islam*, Jakarta: Golden Press.
- Al-Faruqi, Ismail Raji, 1988, *Tauhid Its Implications for Thought and Life*, terjemahan Rahmani Astuti, Bandung: Pustaka,
- Azra, Azyumardi, 2002, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi menuju Millenium Baru*, Jakarta: Logos.
- Al-Qarhawiy, Yusuf, *Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan al-Banna*, Terjemahan Bustami A. Gani dan Zainal Abidin Ahmad dari *Al-Tarbiyah Al-Islamiyah wa Madrasah Hasan Al-Banna*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Afifuddin, 2005, *Perencanaan dan Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Insan Mandiri.
- Abduh, Muhammad, 1972, *al-Madaaris al-Tazhiziyat wa al-Madaaris al-'Aliyat*, dalam 'Imarah (ed.), *al-A'mal al-Kamil li al-Kamil li al-Imam Muhammad Abduh*, Juz III, Beirut: Al-Muassasah al-Arabiyah li al-Dirasah wa al-Nashar.
- Agustian, Ary Ginanjar, 2007, *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual*, Jakarta: Arga.
- Dawam, Ainurrafiq, 2003. *Emoh" Sekolah: Menolak Komersialisasi Pendidikan dan Kanibalisasi Intelektual, Menuju Pendidikan Multikultural*, Yogyakarta: Inspeal Ahimsakarya Press.
- Fakry Gaffar, Mohammad, 2010, *Pendidikan Karakter Berbasis Islam*, Yogyakarta.
- Fadjar, H. A. Malik, 1991, *Visi Pembaruan Pendidikan Islam*, Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penyusunan Naskah Indonesia (LP3NI).
- Husein, Syed Sajjad dan Ali, Ashraf Syed, 1996, *Crisis in Muslim Education*, terjemahan Rahmani Astuti, Bandung: Risalah,
- Hsibuan, Malayu S. P. , 2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- H. A. R. , Tilaar, 2002, *Perubahan Sosial dan Pendidikan. Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo.
- Iqbal, Muhammad, 1982, *Membangun Kembali Pikiran Agama dalam Islam*, alih bahasa Ali Audah dkk, Jakarta: Tintamas.
- Juran, J. M. , 1995, *Merancang Mutu*, Terjemah Bambang Hartono dari Juran *on Quality By Design*, Jakarta: Pustaka Binawan Pressido.

- Kesuma, Dharma, dkk. , 2011, *Pendidikan Karakter: Kajian Teori dan Praktik di Sekolah*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Koesoema, A. , Doni, 2010, *Pendidikan Karakter*, Sumber: Kompas Cyber.
- Lickona, Thomas, 2013, *Pendidikan Karakter (Panduan Legkap Mendidik Siswa Menjadi Pintar dan Baik)*, Bandung: Nusa Media.
- M. Sukidi, 2005, *Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jogjakarta: Mikraj.
- Megawangi, Ratna, 2004, *Pendidikan Karakter; Solusi yang tepat untuk membangun bangsa*. Bogor: Indonesia Heritage Foundation.
- Maksum, 1999, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta: Logos.
- Malik bin Nabi, 1995, *Membangun Dunia Baru Islam*, Terj. Afif Muhammad dan Abdul Adhiem, Bandung: Mizan.
- Marimba, Ahmad D, 1989, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: al- Ma'arif.
- Nurdin, Diding, 2005, *Manajemen Sekolah Berbasis Mutu*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2005.
- Nata, Abuddin, "*Konsep Pendidikan Ibn Sina*, Disertasi, Jakarta: IAIN Syarif.
- Postman, Neil, 2002, *Matinya Pendidikan: Redefinisi Nilai-Nilai Sekolah*, Yogyakarta: Jendela.
- Prabu Mangkunegara, Anwar, 2005, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Permana, Johar, 2011, *Pendidikan Karakter Kajian Teori dan Praktek di Sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Pujiastuti, Pratiwi, 2013, *Pendidikan Untuk Pencerahan dan Kemandirian Bangsa*, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rahman Saleh, Abd. 2004, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa*, Jakarta: Rajawali Press.
- Ramdhani, M. Ali, 2004, *Manajemen Strategi*, Bandung: Insan Akademika.
- Syaukani HR. , 2002, *Titik Temu dalam Dunia Pendidikan*, Jakarta: Nuansa Madani.
- Surachmad, Winarno, 2001, *Pendidikan Nasional Mati Suri?*, Jakarta: Kompas Edisi Mei 2001.
- Santoso, Syarif Hidayat, 2004, "*UAN itu Perlu, Tapi ...*", Surabaya Jawa Pos,.
- Sallis, Edward, 1993, *Total Quality Management in Education*, London: Kogan Page Limited.
- Suparlan, Media, 2010, *Pendidikan Karakter dan Kecerdasan Ganda*, [http/ : www. suparlan. com](http://www.suparlan.com).
- Salusu, J, 2003, *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non-Profit*, Jakarta: Grasindo.
- Sudrajat, Hari, 2005, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Implementasi KBK*, Bandung: CiptaCekas Grafika.
- Tampubolon, Daulat P. 2011, *Perguruan Tinggi Bermutu: Paradigma Baru Manajemen Pendidikan Tinggi Menghadapi Tantangan Abad Ke-21*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tafsir, Ahmad, 1994, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Tim Pendidikan Karakter Kemendiknas, 2010, *Grand Design Pendidikan Karakter*, Jakarta: Kemendinas.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
[http:// okezone. com](http://okezone.com). 23 Oktober 2012.
[http:// kompas. com](http://kompas.com). 17 April 2012.